



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu disusun kerangka kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam suatu rencana penelitian dan pengembangan secara komprehensif dan sinergis dalam dokumen Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan untuk lingkup Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86 – 92);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 – 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
5. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
6. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
10. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

11. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
12. Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 yang selanjutnya disingkat RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

- (1) RIK sebagai dokumen perencanaan di bidang Kelitbangan memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kelitbangan;
 - c. Arah Kebijakan Kelitbangan;
 - d. Strategi Pelaksanaan;
 - e. Penutup.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengkajian;
 - d. Perekayasaan;
 - e. Penerapan;
 - f. Pengoperasian; dan
 - g. Evaluasi Kebijakan.
- (3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan di lingkungan organisasi perangkat daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.
- (2) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIK mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sebelum berakhir masa berlakunya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.

Pasal 5

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan RIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data, gagasan/ide atau informasi.
- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

NO	JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	Assekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappeda Litbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN
TENTANG
RENCANA INDUK PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2021 – 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Fungsi kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan terobosan yang dihasilkan oleh kelitbangan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing tinggi.

Kelitbangan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah. Salah satu dari peran strategis litbang adalah berupaya mewujudkan visi dan misi pembangunan, yang berbasis pada penelitian dan analisa data ilmiah. Keberadaan litbang sangat penting dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berfungsi untuk menumbuhkan, mengembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya. Disamping itu pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan oleh

Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan. Kegiatan alih teknologi tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan Iptek serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memasyarakatkan dan menguasai Iptek guna kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

Lembaga litbang merupakan salah satu unsur utama Sistem Inovasi Nasional (SINas), yang berperan sebagai pengembang Iptek, meningkatkan kapasitas pengembangan Iptek, serta mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan yang dihadapi para pengguna Iptek. Sistem Inovasi sendiri kemudian didefinisikan sebagai keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi antar kelompok pengguna Iptek tersebut. Inovasi sendiri, oleh peraturan dimaksud, diartikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Implementasi dari fungsi kelitbangan diatas salah satunya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inovasi daerah berbentuk: a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; b) inovasi pelayanan publik dan/atau; c) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pengembangan Iptek oleh pemerintah daerah sangat penting untuk dapat menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan di berbagai bidang. Kelitbangan diharapkan menjadi wadah pemikiran yang harus mampu mendorong peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah serta menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Hasil-hasil kelitbangan diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada, serta mampu memberikan masukan bagi perumusan strategi kebijakan dan prioritas utama program Kabupaten Banyumas secara cermat, terpadu, serta berkelanjutan. Kegiatan kelitbangan diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan dalam pengambilan kebijakan strategis daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Urusan Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas berada dibawah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah berdasarkan

Peraturan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas, yang menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Dalam menjalankan fungsi kelitbangan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis melalui Rencana Kerja Kelitbangan yang berbentuk Rencana Induk Kelitbangan untuk masa 5 (lima) tahun.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2019–2024 dan perubahan beberapa kebijakan nasional dan daerah menyebabkan adanya perubahan mendasar yang perlu penyesuaian dalam RPJMD Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 maka Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan penyusunan dan/atau perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan pada Pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa Rencana Induk Kelitbangan disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas akan Menyusun Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Banyumas, masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sinergitas dan kolaborasi antar aktor kelitbangan, potensi dan kemampuan wilayah serta isu-isu strategis pemerintah daerah yang menjadi prioritas kelitbangan. Rencana Induk Kelitbangan disusun dengan melakukan penelaahan terhadap rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) sehingga fungsi kelitbangan selaras dan memperkuat perencanaan pembangunan daerah.

Alur penyusunan meliputi Penyusunan Rancangan, Perumusan Rancangan serta Penetapan, yang diuraikan pada Diagram 1.1. dibawah ini.

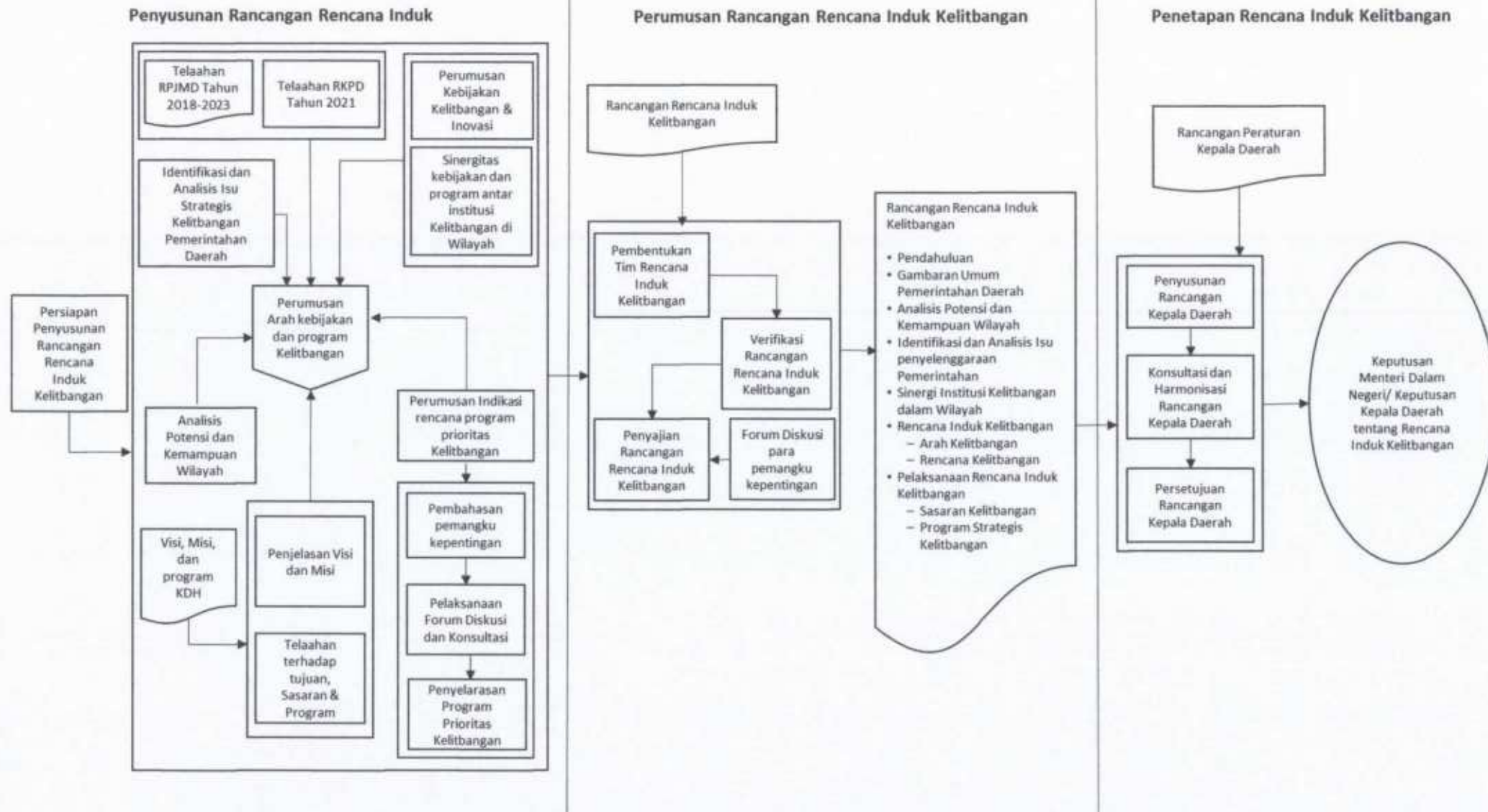


Diagram 1. 1. Alur Pikir Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan– Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86 – 92);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4497);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 - 2023 adalah sebagai arahan/acuan pelaksanaan program/kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. RIK juga berfungsi untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 yang akan ditetapkan di tahun 2021, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program/kegiatan kelitbangan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Banyumas.

1.3.2. Sasaran

Adapun Sasaran dari Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan kelitbangan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang efektif, efisien dan sinergis guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan. RIK menjadi rujukan bagi seluruh stakeholders kelitbangan di Lingkungan Kabupaten Banyumas dalam rangka merumuskan kebijakan, kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banyumas terdiri dari 5 (lima) Bab, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan latar belakang; dasar hukum penyusunan; tujuan dan sasaran; serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Memuat tentang gambaran umum kelitbangan yang meliputi gambaran wilayah secara umum; kondisi sumber daya kelitbangan yang terdiri dari kelembagaan, SDM, pendanaan dan kerjasama kelitbangan; potensi dan masalah; serta peluang dan tantangan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN

Merupakan penjelasan tentang arah kebijakan kelitbangan yang berisi tentang arah kebijakan pembangunan daerah; arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah; serta indikasi program prioritas kelitbangan daerah di

berbagai sektor.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Berisi tentang strategi pelaksanaan program/kegiatan kelitbangan yang terdiri dari 1) Kelembagaan, meliputi : a) koordinasi pelaksanaan, b) keterlibatan institusi, c) kerjasama dan sinergitas pelaksanaan; 2) Mekanisme Pelaksanaan, meliputi : a) sosialisasi, b) perencanaan, c) operasionalisasi, d) Pemantauan; 3) Evaluasi Pelaksanaan, meliputi : a) mekanisme/tahapan evaluasi, b) prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi, c) mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelitbangan, d) bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi, e) indikator pemantauan dan evaluasi; dan 4) Pelaporan.

BAB V PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 - 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2. Gambaran Umum Wilayah

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759,56 ha. Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara 108°39'17"BT–109°27'15"BT dan di antara 7°15'05"LS– 7°37'10"LS. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak pada posisi strategis, yaitu pada persimpangan perhubungan lintas daerah.

Wilayah administratif Kabupaten Banyumas meliputi 27 Kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan, dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes;
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Posisi strategis Kabupaten Banyumas sebagai penghubung lintas daerah mendorong perkembangan perkotaan Purwokerto sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, serta pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang tidak hanya melayani wilayah Kabupaten Banyumas sendiri tetapi juga melayani wilayah sekitar Kabupaten Banyumas.

Topografi di wilayah Kabupaten Banyumas membentuk relief bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Lebih dari 45% wilayah Kabupaten Banyumas adalah daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Daerah dataran rendah terutama berada di bagian Selatan. Dataran tinggi dan perbukitan di sebelah Utara yang merupakan kaki Gunung Slamet, sedangkan dataran tinggi dan perbukitan di sebelah Selatan wilayah Kabupaten Banyumas membentang Perbukitan Serayu.

Sumber daya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi curah hujan, air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m³/hari atau 16.591.564.830 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjarn, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya.

Dari segi penggunaan lahan meliputi lahan sawah sekitar 32.528 Ha atau

24,50 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 69.026 Ha atau 51,99 % dan lahan bukan pertanian seluas 31.204 Ha atau 23,50 %.

Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan, bencana gunung berapi, bencana kebakaran hutan dan lahan. Wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa, potensi rawan bencana banjir tersebar di 6 kecamatan, potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada 22 kecamatan, potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, potensi bencana kekeringan terdapat pada beberapa desa 17 kecamatan.

2.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2019 sebesar 1.693.006 jiwa yang terdiri dari 845.732 laki-laki dan 847.274 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak Kecamatan Cilongok sebanyak 120.606 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 32.437 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.693.060 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah 1.275 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Utara yaitu 7.527 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 437 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur.

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah 49,6. Rasio ketergantungan menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung penduduk usia kerja, rasio ketergantungan 49,6 menggambarkan bahwa 2 orang pekerja (penduduk usia produktif) menanggung 1 orang anak/lansia (penduduk non produktif).

Dengan rasio ketergantungan yang terus menurun Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah dampak transisi

demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja.

Terjadinya bonus demografi akan menjadi peluang bagi pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara.

2.3 Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik

2.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dilaksanakan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 sasaran yang akan dicapai meliputi meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan serta meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Sasaran tersebut dijabarkan melalui delapan area perubahan yaitu : (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; (6) penguatan pengawasan; (7) penguatan akuntabilitas kinerja dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2020 telah dilakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh tim dari Kemenpan dan RB, namun sampai dengan selesai disusunnya laporan kinerja ini belum ada hasil evaluasi yang diperoleh. Sehingga capaian indeks reformasi yang disajikan pada laporan ini merupakan hasil evaluasi tahun 2019. Secara lebih rinci realisasi capaian indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Tahun 2019		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	%
Indeks Reformasi	Nilai	63,79	66,68	66	68,76	102,66

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Tahun 2019		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	%
Birokrasi						
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan				66	68,76	102,66

Rata-rata capaian kinerja tujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 adalah sebesar 102,66 %.

Adapun Rincian hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 - 2019

			Nilai		
No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Komponen Pengungkit					
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,08	2,77	2,022
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,40	1,96
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,01	3,04
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,96	2,85	3,03
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	8,78	11,39	11,99
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,87	4,12	4,24
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	6,49	5,73	5,57
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,66	3,92	3,37
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	34,37	36,19	35,22
Komponen Hasil					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,51	8,43	9,93
2.	Survei Internal Integritas	6,00	5,12	4,74	5,23

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	Organisasi				
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,92	5,92	6,53
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,88	8,40	8,85
Total Komponen Hasil (B)		40,00	29,42	30,49	33,54
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	63,79	66,68	68,76

Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas ditentukan oleh hasil nilai komponen pengungkit dan komponen hasil. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 capaian nilai komponen pengungkit dan komponen hasil mengalami kenaikan. Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2017 sebesar 63,79 menjadi 66,68 di tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 68,76 termasuk kategori “B”. Walaupun terdapat peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas, masih perlu dilakukan perbaikan yang setara pada tingkat Perangkat Daerah.

2.3.2 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja

dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh nilai **73,84** dengan predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penilaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Banyumas

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,78	23,89
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,66	19,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,44	10,73
d.	Evaluasi Internal	10	6,40	7,13
e.	Capaian Kinerja	20	12,66	12,71
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,95	73,84
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja dari tahun 2018 sebesar 70,95 menjadi 73,84 pada tahun 2019 dengan kategori BB. Namun berdasarkan hasil evaluasi, masih perlu peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result oriented goverment*).

2.4 Sosial dan Kemasyarakatan

2.4.1 Kemiskinan

Perkembangan capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan target daerah pada tahun 2015-2019 dapat dilihat

pada grafik berikut:

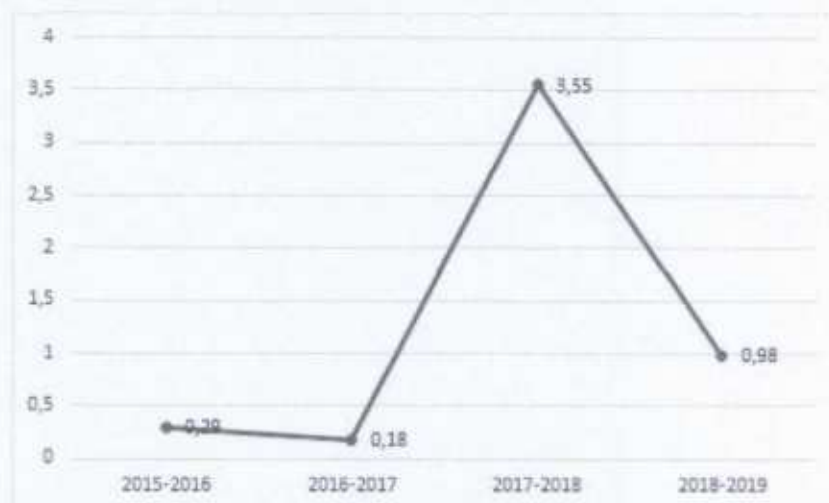


Gambar 2.1.
Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas
Tahun 2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Persentase Penurunan Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 persentase penurunan penduduk miskin di Kabupaten Banyumas sebesar 5 %. Persentase penurunan penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.2.
Persentase Penurunan Penduduk miskin Kabupaten/Kota

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penduduk miskin di Kabupaten Banyumas antara lain:

- Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat
 Bantuan Pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

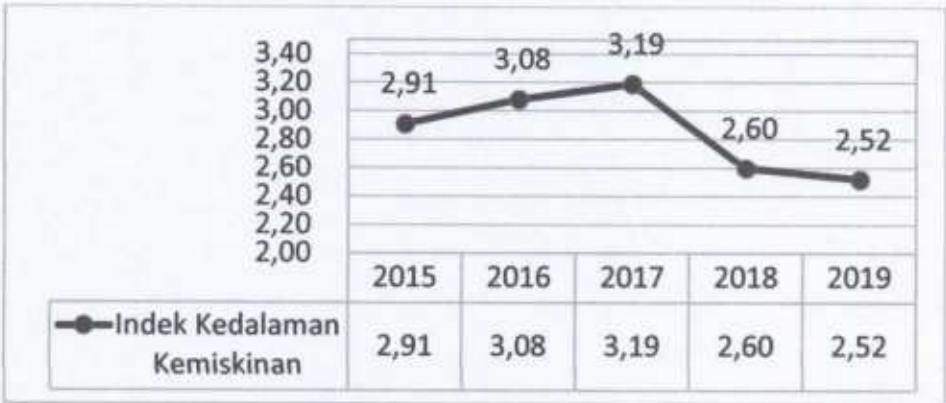
Program Non Tunai (BPNT) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

- Bantuan Sosial dari Kabupaten Banyumas
Bantuan untuk lansia miskin, RTLH, Sanitasi dan Jamban Keluarga
- Pengendalian inflasi
Pengendalian inflasi untuk mencegah gejolak harga sehingga masyarakat miskin memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhannya.

Indek Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index–P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Selanjutnya perkembangan P1 Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



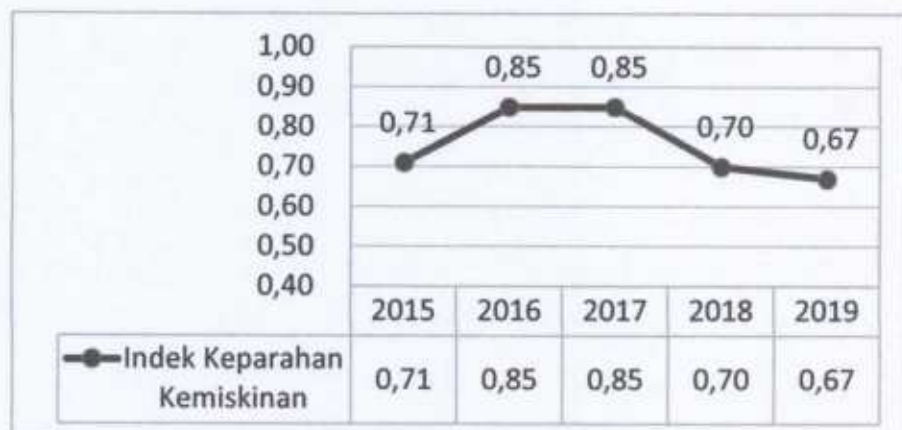
Gambar 2.3.
Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2015–2019
Sumber: BPS Kab. Banyumas, 2019

Pada periode 2015-2019, P1 Kabupaten Banyumas fluktuatif yaitu dari tahun 2015 sebesar 2,91 dan tahun 2016 sebesar 3,08 naik di tahun 2017 sebesar 3,19 dan turun di tahun 2018 sebesar 2,6 dan tahun 2019 sebesar 2,52. Capaian P1 pada tahun 2019 merupakan angka terendah selama kurun waktu 2015-2019. Dengan masih tingginya perkembangan P1 di Kabupaten Banyumas, menunjukkan pendapatan penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan relatif banyak karena masih cukup jauh untuk mendekati garis kemiskinan, atau keluar dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahahan Kemiskinan

Indeks keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2015-2019 fluktuatif, yaitu dari tahun 2015 sebesar 0,71 dan tahun 2016 sebesar 0,85 tetap di tahun 2017 sebesar 0,85 dan turun di tahun 2018 sebesar 0,7 dan tahun 2019 sebesar 0,67. Indeks Keparahahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 juga merupakan angka terendah selama kurun waktu 2015-2019. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir (2015-2019) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.4.

Indek Keparahahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

2.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Namun cakupan IPM lebih sempit sebagai ukuran tingkat pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia hanya mampu mengukur sebagian aspek pembangunan manusia karena beberapa aspek sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya dan sulit untuk memadukan data dari berbagai aspek yang berbeda menjadi satu indeks komposit.

Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 71,96 dan mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar 71,30 yang berada pada peringkat 16 di Jawa Tengah. Dengan memodifikasi klasifikasi pembangunan manusia menurut UNDP yang mengelompokkan tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah ($0 \leq \text{IPM} < 60$), kategori menengah bawah ($50 \leq \text{IPM} < 66$), kategori menengah atas ($60 \leq \text{IPM} < 70$), kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan kategori sangat tinggi ($80 < \text{IPM} \leq 100$), maka tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori tinggi.

Adapun capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Komponen IPM	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Angka harapan hidup saat lahir	73,12	73,23	73,33	73,45	73,55
Harapan Lama Sekolah	12,57	12,58	12,63	12,64	12,82
Rata-rata Lama Sekolah	7,31	7,39	7,40	7,41	7,42
Disparitas Daya Beli	10.104	10.554	10.713	11.240	11.703
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96

2.4.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK PAUD/TK sampai dengan tahun 2019 sebesar 77,25% Untuk APK SD/MI/Paket A mencapai 108,12% dan untuk APK SMP/MTs/Paket tercapai 83,93%. Untuk APK pada jenjang PAUD/TK dan APK pada jenjang SD/MI/Paket A yang masih perlu perhatian. Angka tersebut menunjukkan bahwa belum semua anak usia PAUD mengikuti Pendidikan jenjang PAUD, dan untuk jenjang SMP/MTs/Paket B belum semua mengikuti jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B.

Perkembangan APK Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

No	Angka Partisipasi	Tahun				
	Kasar	2015	2016	2017	2018	2019
1	APK PAUD/TK	75,90	76,05	77,23	77.25	77.25
2	APK SD/MI/ Paket A	111.66	111.43	108.82	108.12	108.12
3	APK SMP/MTs/ Paket B	77.97	90.95	86.79	83.93	83.93

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Angka partisipasi kasar PAUD/TK belum mencapai 100% perlu menjadi perhatian mengingat pentingnya pendidikan usia dini untuk mempersiapkan pendidikan anak ke jenjang pendidikan selanjutnya, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak, dan membentuk kepribadian anak secara positif. Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B belum mencapai 100% mengindikasikan bahwa terdapat anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memperoleh manfaat dari bonus demografi di Kabupaten Banyumas.

Angka partisipasi kasar SD/MI di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 melebihi 100%. Hal ini dimungkinkan karena populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu karena tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, dan sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan karena sekolah di usia yang lebih muda.

2.4.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM SD/MI/Paket A Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat yaitu sebesar 91,70 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 93,43 pada tahun 2019. Namun demikian capaian APM SD/MI/Paket A pada tahun 2019 belum memenuhi target sebesar 95%.

APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumastahun 2015-2019 cenderung meningkat, namun capainnya hanya 79,00% di tahun 2019. APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B masih perlu perhatian dalam rangka pendidikan dasar sembilan tahun dan pembangunan sumber daya manusia. Angka partisipasi murni Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

No	Angka Partisipasi Murni	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	APM SD/MI/Paket A (%)	91,70	92,67	92,57	98,80	93,52
2	APM SMP/MTs/Paket B (%)	72,87	75,83	76,23	81,45	79,00

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

2.4.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah mengindikasikan seberapa besar akses (keterjangkauan) dari penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan formal di sekolah. Sebagai gambaran APS pada kelompok umur yang lebih tua akan cenderung menurun. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Capaian APS pendidikan kelompok umur 7-12 tahun Kabupaten Banyumas cenderung meningkat di bawah APS Provinsi Jawa Tengah dan diatas

Nasional. Pada tahun 2019 APS pendidikan kelompok umur 7-12 tahun Kabupaten Banyumas adalah 99,43% dan untuk Jawa Tengah sebesar 99,76%. dan Nasional sebesar 96,24% Perbandingan APS Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 ditampilkan dalam grafik berikut ini:



Gambar 2. 1 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kelompok Umur 7-12 Tahun Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Sedangkan APS pendidikan kelompok umur 13-15 tahun Kabupaten Banyumas sebesar 95,32% lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 96,11% dan nasional sebesar 94,25 %.



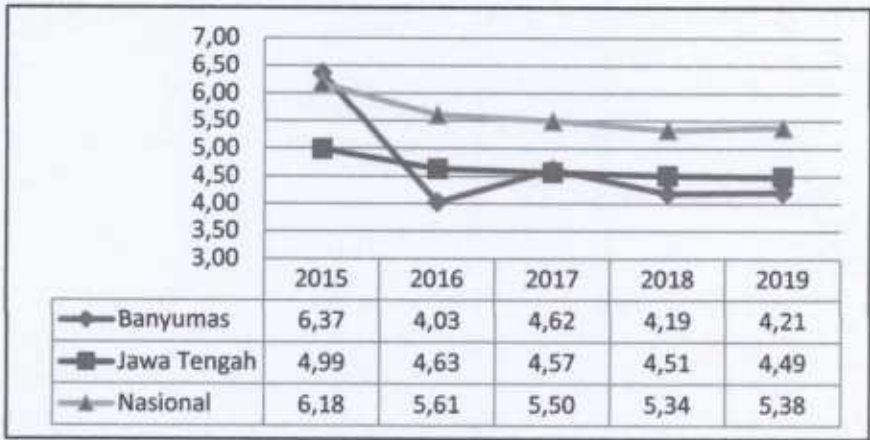
Gambar 2. 2 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kelompok Umur 13-15 Tahun Kabupaten Banyumas Tahun Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

2.4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengupayakan

penciptaan berbagai lapangan kerja, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019

2.4.7 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal daan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menunjukan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu tahun 2019 sebesar 37,62 menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 67,87 dan jauh di bawah AKI Provinsi Jawa Tengah sebesar 78.60. Namun demikian upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian, dikarenakan beberapa

kasus kematian ibu hamil semestinya masih dapat dicegah antara lain pada kasus perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 4 Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2019

Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 %) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas, dengan melalui beberapa pendekatan yaitu:

- Pendekatan infrastruktur: pembangunan infra struktur kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes.); pembangunan infrastruktur jalan akses kesehatan; pembangunan infrastruktur pemukiman (Sanitasi: jambanisasi, air bersih, penataan lingkungan kumuh: Rumah Layak Huni).
- Pendekatan sosial: pembinaan poyandu, pembinaan upaya kesehatan kerja, pembinaan desa siaga, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pembina dan pemberdayaan kelompok masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat.
- Pendekatan ekonomi: penyaluran hibah uang dana bergulir, program desa mandiri pangan, pembinaan UMKM, pembinaan produksi pangan rumah tangga.

2.4.8 Stunting

Kasus stunting di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 masih cukup tinggi sehingga Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 2017-2019 kasus stunting mengalami penurunan dari 24,5 menjadi 15,96 %. Upaya penurunan ini yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah implementasi gerakan hidup sehat, Intervensi Gizi Spesifik, Intervensi Gizi Sensitif dan Workshop Stunting Dan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting bagi masyarakat. Prosentase Kasus Stunting Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Persentase Kasus Stunting Tahun 2015-2019

No	Tahun	% Stunting
		Balita 0-59 bulan
1	2015	NA
2	2016	20
3	2017	24,5
4	2018	20,4
5	2019*	15,96

Sumber: RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas Tahun 2019–2023

2.4.9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG mempunyai kegunaan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan.

IDG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2015–2019 mengalami fluktuasi. IDG Kabupaten Banyumas di tahun 2019 sebesar 71,92 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 72,18. Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-2 dari 4 kabupaten. Berikut perbandingan IDG Kabupaten Banyumas dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 2. 8 Perbandingan IDG Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017–2019

Kabupaten se eks Karesidenan Banyumas	Tahun			
	2017	2018	2019	Peringkat
Jawa Tengah	75.10	74.03	72.18	
Kabupaten Banyumas	67.32	68.11	71.92	2
Kabupaten Cilacap	62.52	62.11	69.13	4
Kabupaten Purbalingga	73.11	75.51	70.60	3
Kabupaten Banjarnegara	66.44	65.12	72.84	1

Sumber : BPS, 2020

Nilai IDG yang masih rendah disebabkan beberapa permasalahan antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga).

2.4.10 **Indek Resiko Bencana (IRB)**

Dalam indeks risiko bencana, itngkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tngkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana.

Penilaian secara berkelanjutan terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$Indeks\ Resiko\ Bencana = Bahaya * \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$$

Di mana, Bahaya (ancaman) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. Penentuan bobot per jenis bahaya ditentukan berdasarkan hubungan antara frekusensi kejadian dengan adanya tidak peringatan.

Kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Bobot kerentanan berbeda untuk masing-masing jenis bahaya yang dihitung berdasarkan indeks penduduk terpapar dalam jiwa, kerugian dalam rupiah dan kerusakan lingkungan dalam hektar.

Komponen Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logis; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Komponen kapasitas disusun untuk semua jenis bencana berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

IRB Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2017–2019 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, masih pada posisi 207,20 masuk kategori kelas beresiko tinggi. IRB Kabupaten Banyumas di tahun 2019 sebesar 207 lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 158. Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah, IRB Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-3 dari 4 kabupaten. Berikut perbandingan IRB Kabupaten Banyumas dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 2. 9 Perbandingan IRB Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017–2019

Kabupaten se eks Karesidenan Banyumas	Tahun			
	2017	2018	2019	Peringkat
Provinsi Jawa Tengah	149.16	146.47	158	
Kabupaten Cilacap	215	215	215	4
Kabupaten Banyumas	207.20	207.20	207	3
Kabupaten Purbalingga	159,2	159,2	159	2
Kabupaten Banjarnegara	150.00	150.00	150	1

Sumber : BNPB, 2020

Nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Oleh karena itu untuk menurunkan nilai IRB Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan bencana.

2.5 Ekonomi dan Pembangunan

2.5.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Banyumas telah bergeser dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan ke kategori ekonomi industri dan perdagangan. Terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas. Tetapi penurunan tersebut bukan berarti menurunnya nominal PDRB, nominal PDRB tetap naik tetapi tidak secepat kenaikan lapangan usaha lainnya.

Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2015-2019 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015–2019

Lapangan Usaha		ADHB (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,21	13,79	13,15	12,73	11,99
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	5,60	5,56	5,72	5,53
C	Industri Pengolahan	24,19	24,48	24,32	24,34	24,66
D	Peng. Listrik & Gas	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	12,05	12,41	12,82	13,25	13,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,77	15,45	15,19	15,28	15,57
H	Transportasi dan Pergudangan	3,64	3,59	3,56	3,49	3,56
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,24	3,34	3,38	3,30	3,33
J	Informasi dan Komunikasi	4,17	4,21	4,67	4,66	4,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,14	3,26	3,31	3,22	3,15
L	Real Estate	2,19	2,19	2,23	2,20	2,18
M, N	Jasa Perusahaan	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32

Lapangan Usaha		ADHB (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,35	3,28	3,19	3,06	2,98
P	Jasa Pendidikan	5,23	5,24	5,40	5,51	5,64
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,95	0,96	0,98	1,00	1,00
R, S,T ,U	Jasa Lainnya	1,69	1,74	1,78	1,75	1,82
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan dari kategori industri pengolahan sebesar 24,66 persen, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,57 persen, kategori konstruksi sebesar 13,20 persen dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,99 persen. Sedangkan peranan kategori lainnya dibawah 6 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi tidak lagi didominasi oleh pertanian. Kontribusi lapangan usaha pertanian terus menurun meskipun masih dapat tumbuh. Dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2019 mencapai 6,32 persen, turun sekitar 0,13 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 11,74 persen, dan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,31 persen. Pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,84	2,85	3,17	2,97	0,31
B	Pertambangan dan Penggalian	2,12	4,06	4,55	4,27	3,34
C	Industri Pengolahan	8,63	5,40	5,13	6,37	7,99
D	Peng. Listrik & Gas	2,07	7,16	4,36	6,76	5,16

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
E	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,61	2,08	10,54	5,43	4,17
F	Konstruksi	6,02	11,26	9,84	8,63	4,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,35	4,66	4,59	7,64	8,11
H	Transportasi dan Pergudangan	6,84	5,97	6,24	6,47	7,97
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,76	9,38	8,64	5,57	7,76
J	Informasi dan Komunikasi	6,89	9,25	15,09	8,99	11,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,82	9,38	5,46	3,99	4,29
L	Real Estate	7,71	6,50	8,34	5,57	5,48
M, N	Jasa Perusahaan	9,69	7,04	7,52	8,39	10,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	8,14	1,34	2,39	3,36	3,64
P	Jasa Pendidikan	6,61	5,82	7,52	8,44	8,10
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,51	8,82	8,90	9,51	7,28
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,35	7,47	9,32	7,08	9,05
PDRB		6,12	6,05	6,34	6,45	6,32

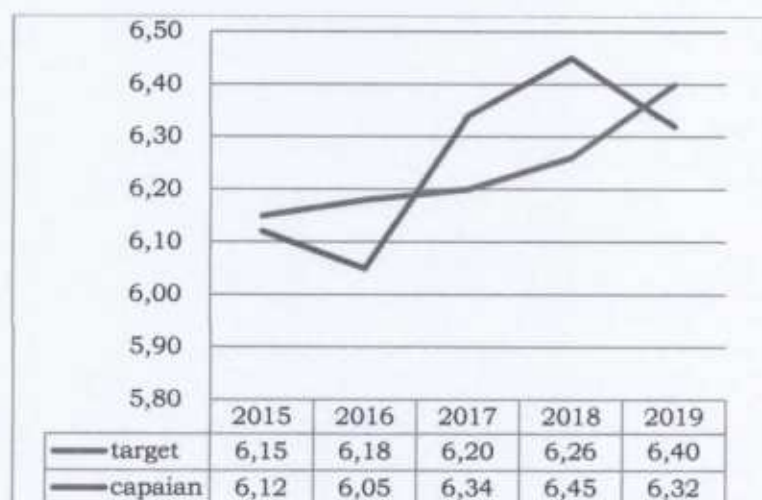
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas diharapkan dapat berkontribusi untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2015 s.d 2019 berfluktuasi dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.



Gambar 2. 5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2015-2019



Gambar 2. 6 Perbandingan Target dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2019

Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih tinggi. Untuk itu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dengan peningkatan kualitas pertumbuhan melalui pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

Ditinjau dari aspek pengeluaran, PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2019 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yakni sebesar 66,72%, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya sebesar 38,57%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan penurunan selama kurun waktu lima tahun dari sebesar 71,63% pada tahun 2015. Secara rinci data kontribusi PDRB Kabupaten Banyumas menurut pengeluaran selama kurun waktu lima tahun yakni mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

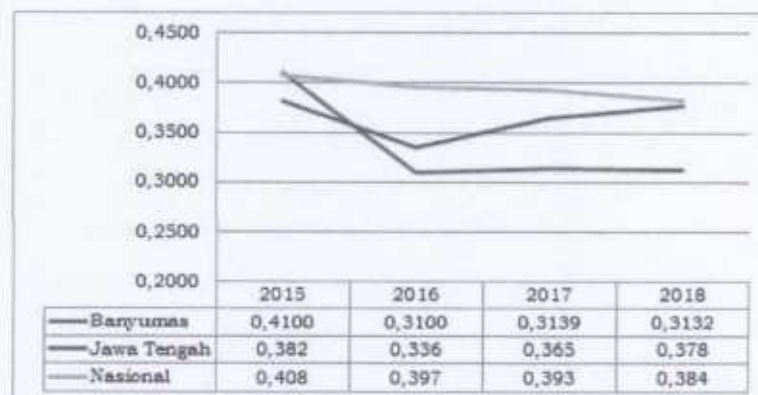
Tabel 2. 12 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2015–2019

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (%)	71,63	70,48	69,44	67,66	66,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)	1,15	1,15	1,15	1,16	1,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)	9,77	9,51	9,26	8,90	8,49
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	37,77	38,19	38,17	38,44	38,57
5	Perubahan Inventori (%)	0,85	0,37	0,35	0,37	0,33
6	Net Ekspor	21,17	19,70	18,15	16,51	15,32
PDRB Total		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

2.5.2 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perkembangan Indeks Gini di Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015-2018 menunjukkan angka yang cenderung membaik. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,4100 dan titik timpang rendah pada tahun 2016 sebesar 0,3100. Perkembangan Indeks Gini tahun 2015-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 7 Indeks Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2015–2018

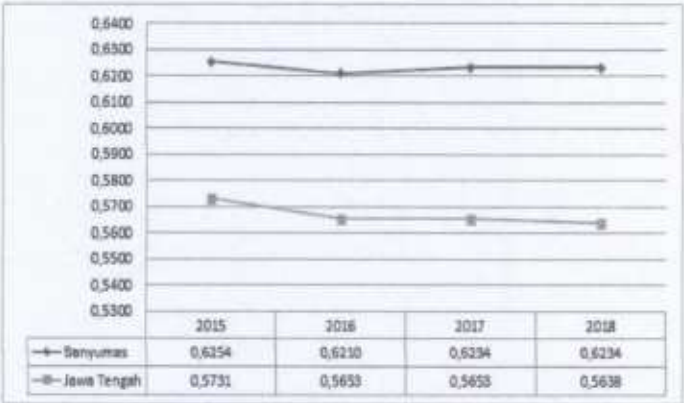
Sumber: Bappedalitbang dan BPS 2019

Indeks Gini Kabupaten Banyumas tahun 2019 sudah tidak dapat lagi dirilis datanya oleh BPS Kabupaten Banyumas dikarenakan data untuk wilayah Kabupaten Banyumas kurang memenuhi syarat dalam samplingnya.

2.5.3 Indeks Williamson

Indeks Williamson memberikan gambaran tentang kondisi dan

keberhasilan pembangunan ditinjau dari aspek penyebaran hasil pembangunan. Angka Indeks Williamson yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin kecil. Hasil perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Banyumas fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2018 perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Banyumas sebesar 0,5638. Hal ini memberikan makna bahwa ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Banyumas cukup besar dan pembangunan di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas belum merata.



Gambar 2. 8 Indeks Williamson Kabupaten Banyumas Tahun 2015–2018
Sumber: BPS 2019

Seperti halnya Indeks Gini, Indeks Williamsom Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 juga tidak lagi dirilis datanya oleh BPS Kabupaten Banyumas dikarenakan data untuk wilayah Kabupaten Banyumas kurang memenuhi syarat dalam samplingnya.

2.5.4 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan merupakan turunan pangan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten dan Provinsi.

Tabel 2. 13 Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
Aspek Ketersediaan Pangan		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30
Sub Total		0,30
Aspek Keterjangkauan Pangan		
2.	Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan	0,15

No	Indikator	Bobot
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
Aspek Pemanfaatan Pangan		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Prevalensi balita stunting	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40

Indek Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 79,27 sedangkan pada tahun 2018 sebesar 73,99. Hal ini menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan kabupaten mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

2.5.5 Indeks Daya Saing Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan satu indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Tahun 2019		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	%
Indeks daya Saing Infrastruktur	Nilai	NA	70,88	79,86	65,48	81,99
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						81,99

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat pada tahun 2019 adalah

sebesar 81,99%.

Indeks Daya Saing infrastruktur merupakan suatu indeks yang menggambarkan tentang kondisi infrastruktur di suatu daerah dengan capaian dari masing-masing komponen. Komponen yang mempengaruhi indeks daya saing infrastruktur adalah Panjang jalan kondisi baik, persentase rumah tinggal pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi, sarana perhubungan (terminal),

2.5.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditunjukan dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Hasil analisis kualitas lingkungan hidup menunjukan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah 64.62. Hal ini berarti bahwa kualitas lingkungan hidup dalam kategori cukup baik. Namun demikian jika dilihat dari komponen pembentuknya diketahui kualitas air di Kabupaten Banyumas yang kurang baik (34.67) indeks kualitas air tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan data tahun 2018 dengan metode indeks pencemar, dengan skala nilai tertinggi 70, dan 6 parameter. Karena nilai fecal coli cukup tinggi maka nilainya menjadi sangat turun rendah.

Tabel 2. 15 Hasil Perhitungan IKA Kabupaten Banyumas Tahun 2019 (Sumber Data Tahun 2018)

Titik Pantau	Lokasi	Nilai	Kriteria
1	Sungai Cihaur Hulu	30,00	sedang/tercemar ringan
2	Sungai Tajum	34,00	buruk/ tercemar berat
3	Sungai Logawa	37,14	buruk/ tercemar berat
4	Sungai Pelus	35,00	buruk/ tercemar berat
5	Sungai Tipar	30,00	sedang/tercemar ringan
6	Sungai Ijo	30,00	sedang/tercemar ringan

Titik Pantau	Lokasi	Nilai	Kriteria
Nilai IKA			34,67
KRITERIA			buruk/ tercemar berat

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2019

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 menyusun Inventarisasi Lingkungan Hidup dalam rangka Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Banyumas. Penyusunan dokumen dimaksud mengidentifikasi daya dukung lingkungan Kabupaten Banyumas berdasarkan perhitungan daya dukung air, daya dukung pangan dan daya dukung lahan bangunan

Berdasarkan ketiga perhitungan daya dukung tersebut dapat disimpulkan daya dukung lingkungan pada masing-masing kecamatan. Selanjutnya perhitungan daya dukung lingkungan menggunakan pembobotan yang digunakan dalam tata ruang yaitu daya dukung lahan terbangun sebesar 30%, daya dukung pangan sebesar 40% dan daya dukung air sebesar 30%, serta status daya dukung mengacu pada 1) $DDL < 1$: Daya dukung lingkungan terlampaui atau buruk; 2) $DDL 1-3$: Daya dukung lingkungan bersyarat atau sedang, dan 3) $DDL > 3$: Daya dukung lingkungan baik, berikut adalah rincian daya dukung lingkungan untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2. 16 Daya Dukung Lingkungan Kabupaten Banyumas

Kecamatan	DD Terbangun (30%)	DD Pangan (40%)	DD Air (30%)	DD Lingku ngan	STATUS
Ajibarang	2,49	1,14	1,41	1,63	Bersyarat
Banyumas	1,51	0,96	1,89	1,40	Bersyarat
Baturaden	3,78	1,41	2,70	2,51	Bersyarat
Cilongok	3,45	1,54	1,99	2,25	Bersyarat
Gumelar	5,66	1,65	3,83	3,51	Baik
Jatilawang	2,79	2,45	0,81	2,06	Bersyarat
Kalibagor	2,66	1,71	0,91	1,76	Bersyarat
Karanglewas	2,05	1,74	0,99	1,61	Bersyarat
Kebasen	2,76	1,37	1,28	1,76	Bersyarat
Kedungbanteng	4,32	2,01	2,41	2,82	Bersyarat
Kembaran	1,70	1,52	0,57	1,29	Bersyarat

Kecamatan	DD Terbangun (30%)	DD Pangan (40%)	DD Air (30%)	DD Lingkungan	STATUS
Kemranjen	2,17	2,27	0,95	1,84	Bersyarat
Lumbir	5,33	1,70	4,85	3,74	Baik
Patikraja	2,86	2,08	0,92	1,97	Bersyarat
Pekuncen	4,07	2,12	1,32	2,46	Bersyarat
Purwojati	2,45	2,76	1,04	2,15	Bersyarat
Purwokerto Barat	0,77	0,30	1,48	0,80	Terlampau i
Purwokerto Selatan	0,85	0,19	1,44	0,76	Terlampau i
Purwokerto Timur	0,63	0,14	1,51	0,69	Terlampau i
Purwokerto Utara	0,85	0,38	1,33	0,80	Terlampau i
Rawalo	3,05	2,42	0,83	2,13	Bersyarat
Sokaraja	1,37	1,48	0,73	1,22	Bersyarat
Somagede	3,82	1,34	1,63	2,17	Bersyarat
Sumbang	2,54	2,02	1,56	2,04	Bersyarat
Sumpiuh	2,89	2,19	0,99	2,04	Bersyarat
Tambak	2,18	3,32	0,88	2,25	Bersyarat
Wangon	2,74	1,52	1,34	1,83	Bersyarat
KAB. BANYUMAS	2,69	1,56	1,27	1,81	Bersyarat

Sumber: Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Banyumas-Inventarisasi Lingkungan Hidup, 2019

Berdasarkan daya dukung lingkungan di atas menunjukkan bahwa kondisi daya dukung lingkungan Kabupaten Banyumas adalah 1,81 atau dalam kategori sedang atau bersyarat. Ditinjau dari masing-masing kecamatan maka Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kecamatan Purwokerto Utara dalam kondisi terlampau. Daya dukung lingkungan dengan status baik berada di Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Lumbir.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang menjadi masih menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Berbagai upaya dan

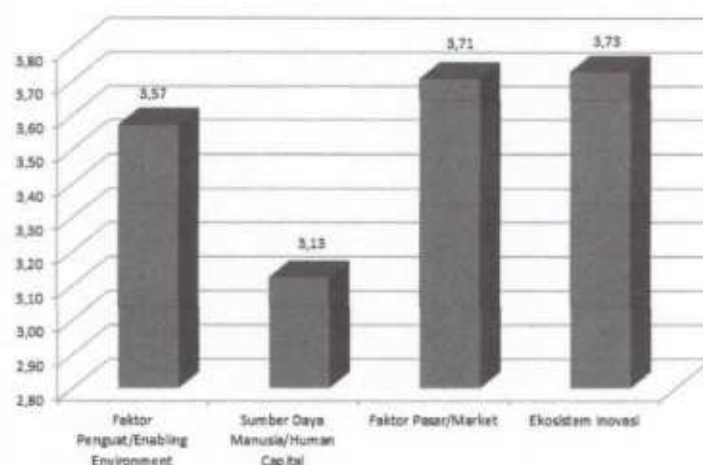
inovasi dalam pengelolaan sampah telah dilakukan. Namun demikian belum semua permasalahan terkait sampah dapat diselesaikan. TPA menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Banyumas untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Meskipun sudah banyak dikembangkan hangar sampah dan pusat daur ulang (PDU) sampah di beberapa wilayah, residu sampah masih besar jumlahnya. Sementara TPA yang ada dan masih beroperasi tidak melayani wilayah perkotaan Purwokerto yang merupakan penghasil sampah terbesar di Kabupaten Banyumas.

2.6 Inovasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

2.6.1 Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan komponen yang penting dalam pencapaian arah kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023. Sebagaimana tercantum dalam Misi yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi ini berfokus pada 2 (dua) tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis.

Pembentuk daya saing daerah dapat dihitung dari empat aspek (Faktor Penguat, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi) yang didukung oleh 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator. Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian Tim IDSD dalam laman indeks.inovasi.ristekbrin.go.id, **Kabupaten Banyumas memperoleh nilai Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,533**. Perbandingan berdasarkan nilai dari empat aspek dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. 9 Grafik Perbandingan pembentuk nilai IDSD dari empat aspek

Aspek Ekosistem Inovasi merupakan aspek tertinggi untuk Kabupaten Banyumas dengan nilai sebesar 3,73, dengan pilar Kesiapan Teknologi memiliki

nilai tertinggi yaitu 4,75. Hal ini didukung dengan jumlah penggunaan HP dan internet yang tinggi serta tingginya jumlah inovasi teknologi yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Inovasi teknologi ini diinventarisir dari lembaga lembaga yang mempunyai kapasitas dalam pengembangan teknologi.

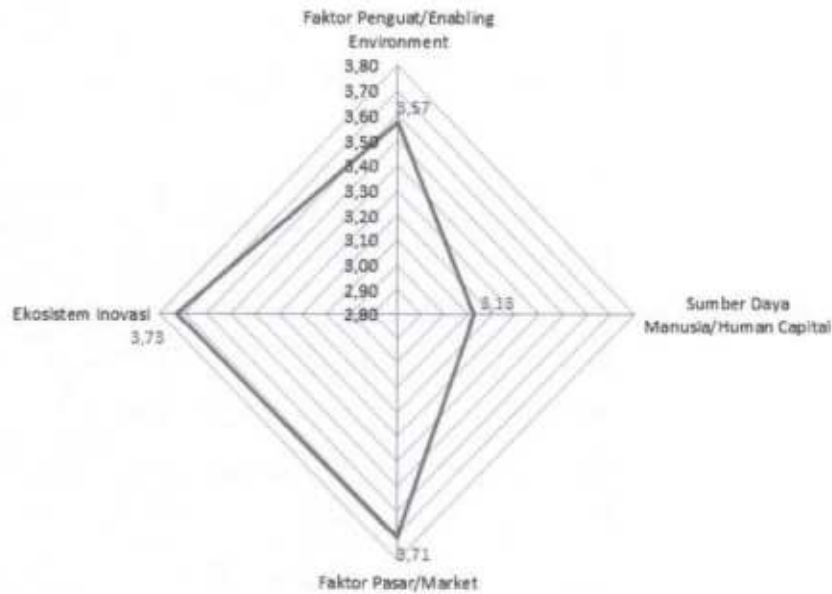
Aspek Faktor Pasar/Market merupakan aspek tertinggi kedua dengan nilai 3,71, dimana pilar ukuran pasar menjadi pilar dengan nilai tertinggi yaitu 4,33. Pilar ini didukung oleh salah satunya rasio jumlah penduduk usia 17 Tahun keatas dibanding dengan jumlah penduduk yang mencapai rasio 81,78%. Jumlah anak muda yang sangat penting, paling tidak ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, anak muda adalah sumber penting tenaga kerja produktif. Kedua, karakter anak muda yang suka mencoba hal baru dan kreatif merupakan sumber inovasi. Ketiga, anak muda merupakan salah satu pasar yang konsumtif terutama untuk industri hiburan dan makanan¹.

Aspek yang perlu mendapat perhatian adalah **Aspek Sumber Daya Manusia**, dimana menempati urutan terendah diantara keempat aspek tersebut yaitu dengan nilai sebesar 3,13. Perhatian khususnya adalah pada pilar pendidikan dan keterampilan yang hanya memperoleh nilai sebesar 2,25. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, jumlah penduduk dengan pendidikan diploma sampai dengan S2 memiliki nilai yang rendah. Hal ini memerlukan strategi khusus pemerintah untuk menaikkan indikator ini. Dalam hal keterampilan, bahwa jumlah program pelatihan pada Balai Latihan Kerja dinilai masih kurang dan jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dinilai masih belum memadai dari segi kuantitas.

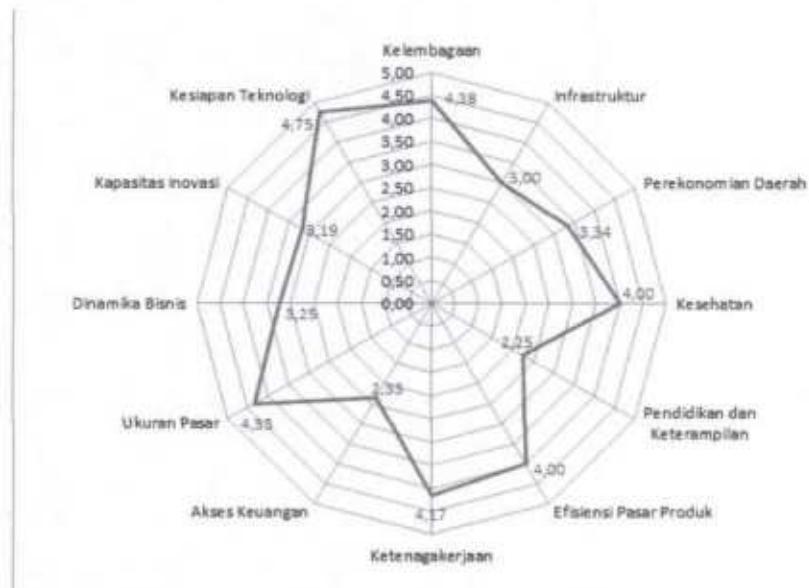
Aspek Faktor Penguat terutama pada sektor infrastruktur dinilai masih memerlukan perhatian lebih lanjut yaitu rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor. Aspek Faktor Penguat memperoleh nilai sebesar 3,57, dengan pilar infrastruktur memperoleh nilai sebesar 3,0. Hal ini menunjukkan kapasitas jalan yang ada tidak memadai dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang terjadi.

Tabel Jaring Laba-laba Daya Saing Daerah berdasarkan Aspek dan Daya saing Daerah berdasarkan Pilar terlampir dalam Gambar 2., dan Gambar 2.

¹ Hasanudin Ali, alvara-strategic.com



Gambar 2. 10 Tabel Jaring Laba-laba Daya Saing Daerah berdasarkan Aspek



Gambar 2. 11 Tabel Jaring Laba-laba Daya Saing Daerah berdasarkan Pilar

Pilar yang memperoleh nilai tertinggi adalah **Pilar Kesiapan Teknologi**, dengan capaian nilai 4,75. Pilar ini didukung oleh Dimensi Telematika dan Teknologi. Indikator dalam pilar ini adalah tingkat penggunaan handphone dan internet oleh penduduk serta pelaksanaan inovasi teknologi di Kabupaten Banyumas seperti perguruan tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, dan lembaga litbang lainnya. Beberapa kegiatan yang mendukung inovasi teknologi seperti lomba krenova, inovasi desa, inkubasi teknologi di perguruan tinggi dan inkubator swasta, serta inovasi Teknologi Tepat Guna yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat.

Pilar dengan nilai tertinggi kedua adalah **Pilar Ukuran Pasar** dengan

capaian nilai sebesar 4,33. Pilar ini memiliki keunggulan rasio jumlah penduduk diatas 17 Tahun yang tinggi yang merupakan potensi pasar yang sangat baik bagi usaha dan industri.

Selanjutnya pilar tertinggi ketiga adalah **Pilar Kelembagaan** dengan capain nilai sebesar 4,25. Pilar ini terdiri dari dimensi Tata Kelola Pemerintahan serta Keamanan dan Ketertiban. Pilar ini diperkuat dengan berbagai hasil atau skor yang diperoleh dari evaluasi lembaga pemerintah tingkat pusat seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan skor 3,1193 (Sangat Tinggi); Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan skor 68,76 (kategori B); Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan skor 73,84 (predikat BB); Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor 2,65 (predikat Baik); serta penyelesaian pelanggaran K3 dan penegakan Perda yang mencapai 100%.

2.6.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebarharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagin pemerintahan daerah.

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk:

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: E-Planning, E-Budgetingdan lain sebagainya.

b. Inovasi Pelayanan publik; dan/atau

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam

pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Jadi Penilaian untuk Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) adalah penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek Input, Proses, Output, Outcome.

Pada Tahun 2020 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas mendapat skor sejumlah 3900 masuk kategori sangat inovatif.

2.7 Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

2.7.1 Kelembagaan Kelitbangan di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Susunan organisasi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan dan Pengendalian serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.

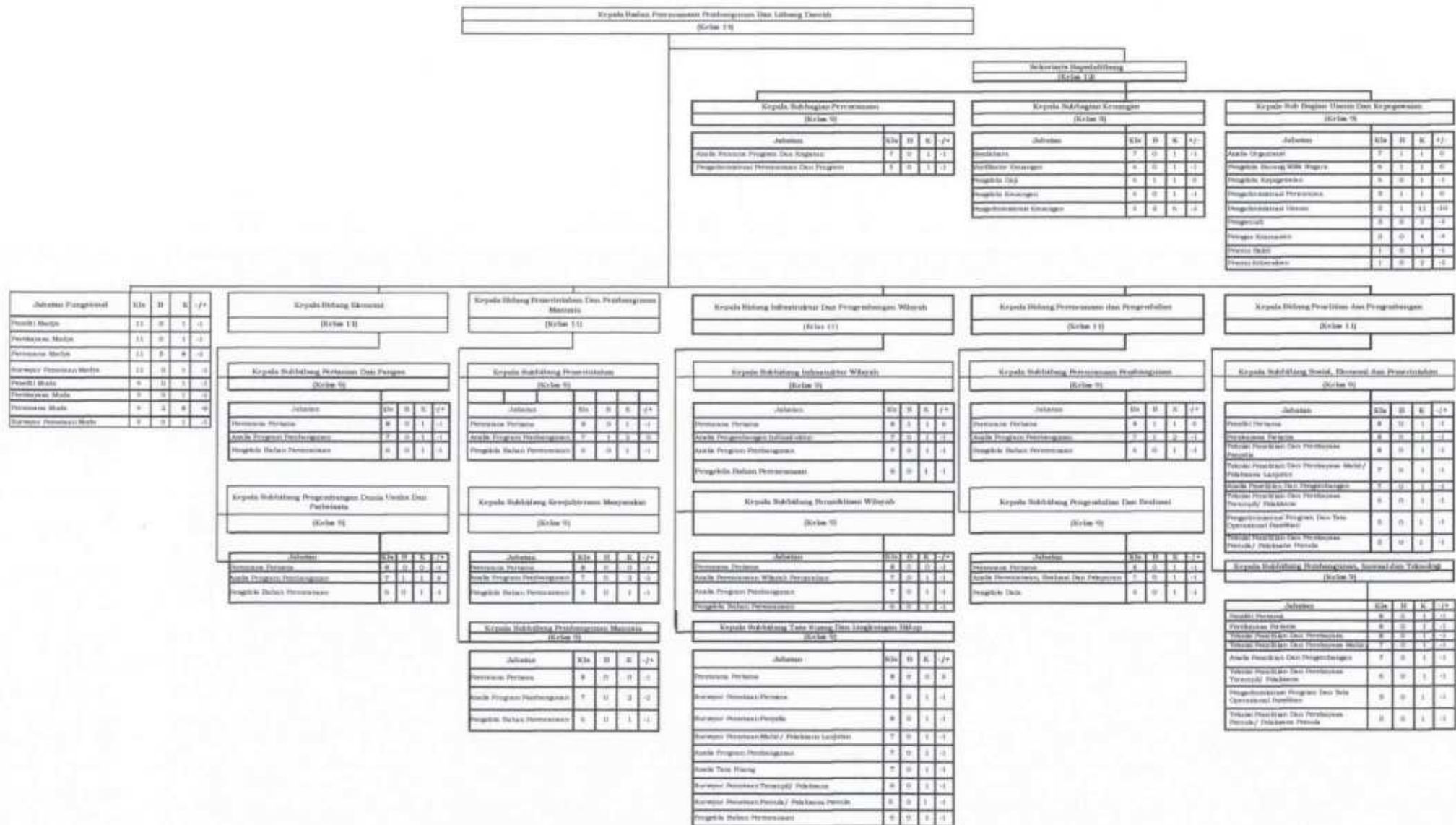
Mulai Januari 2020, penyelenggara fungsi urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan. Tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Penelitian dan Pengembangan antara lain merencanakan,

merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi penelitian dan pengkajian serta pengembangan dan penerapan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan daerah yang meliputi penelitian dan pengembangan utama dan penelitian dan pengembangan pendukung; pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. pengkoordinasian kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota; pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah yang meliputi penelitian dan pengembangan utama dan penelitian dan pengembangan pendukung;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh 2 (dua) sub bidang yaitu Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, 1 (satu) orang Pejabat fungsional Perencana dan 1 (satu) orang pengadministrasi program dan tata operasional penelitian. Saat ini, bidang Litbang belum memiliki Jabatan fungsional peneliti, fungsional perekayasa dan analis kebijakan seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No 17 Tahun 2016.

Struktur organisasi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas lebih jelasnya diuraikan pada Diagram dibawah ini



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

Dari unsur kelembagaan Litbang perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas, baik perguruan tinggi negeri atau swasta pada umumnya berbentuk Lembaga Penelitian (Lemlit) atau Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sebanyak 24 unit, yang terdiri dari 2 perguruan tinggi negeri dan 22 perguruan tinggi swasta. Lembaga litbang perguruan tinggi tersebut selama ini baru beberapa perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan Kelitbangan, serta menjadi bagian dalam jaringan kelitbangan untuk komunikasi, sinkronisasi dan kerjasama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, terkait pembentukan pengorganisasian kelitbangan yang terdiri atas Majelis Pertimbangan (MP), Tim Pengendali Mutu (TPM) dan Tim Kelitbangan. Perorganisasian kelitbangan tersebut, di Pemerintah Kabupaten Banyumas belum secara penuh berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri. Majelis Pertimbangan (MP) sudah mulai diinisiasi pada pertengahan tahun 2020 dengan membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Banyumas sesuai Keputusan Bupati Banyumas nomor 050/524 Tahun 2020 tentang Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 yang bertugas memberikan arah dan kebijakan umum Penelitian dan Pengembangan; memberikan pertimbangan pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan; dan Memberikan dukungan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.

2.7.2 Sumber Daya

Terlaksananya tugas-tugas kelitbangan sangat tergantung dengan kualitas aparaturnya. Untuk itu, dibutuhkan tenaga aparatur yang profesional dan berkompeten. Profesional berarti aparatur memiliki pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta berkomitmen atas tercapainya tujuan kelitbangan. Sementara berkompeten dapat diartikan bahwa aparatur memiliki keterampilan yang sesuai yang diperlukan dan secara konsisten menunjukkan kinerja yang memadai.

Sumber Daya Manusia pada Bidang Kelitbangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional umum. Pejabat struktural terdiri dari Kepala Bidang dan (2) dua Kepala Sub Bidang. 1 (satu) Pejabat Fungsional Perencana madya, 1 (satu) pejabat fungsional umum, sebagai pendukung kegiatan dibantu oleh 2 (dua) orang staf non PNS. Saat ini, bidang Litbang belum memiliki Jabatan fungsional peneliti,

jabatan fungsional perekayasa dan analis kebijakan seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No 17 Tahun 2016.

Tabel 2. 17 Formasi Personil Bidang Penelitian dan Pengembangan

Jabatan	Posisi/Kedudukan	Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah
Pejabat Administrator	Kepala Bidang Litbang/ eselon 3	IVa	S2 Administrasi Publik	1
Pejabat Pengawas	Kepala Sub Bidang/ eselon 4	IIIId	S2 Perencanaan Wilayah Kota	1
		IIIId	S2 Administrasi Pemerintahan	1
Jabatan Fungsional Perencana	Perencana Madya	IVb	S2 Manajemen	1
Jabatan Pelaksana	Pengadministrasian Program dan Tata Operasional Penelitian	II	D1 Keuangan Negara	1
Jumlah				5

Sumber: Data Kelitbangan Kabupaten Banyumas, 2020

Keterbatasan sumber daya kelitbangan di Bappelitbang Kabupaten Banyumas saat ini diatasi dengan melibatkan para tenaga ahli/ pakar sebagai tim pelaksana dan/atau narasumber dengan latar belakang bidang keahlian dari kalangan akademisi, praktisi, peneliti atau birokrat dari pemerintah daerah maupun pusat sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, kerjasama yang dijalin dengan stakeholder kelitbangan menjadi salah satu solusi untuk dapat mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada.

2.7.3 Pendanaan Kelitbangan

Pembiayaan penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, saat ini masih menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Berikut Besaran dan Proporsi Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan terhadap

APBD Kabupaten Banyumas pada 5 tahun terakhir tersaji pada Tabel 2.12 dibawah ini.

Tabel 2. 18 Besaran dan Proporsi Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan terhadap APBD Kabupaten Banyumas

Tahun	Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan	APBD Kabupaten Banyumas (Anggaran)	Proporsi Anggaran Program terhadap APBD (dalam %)
2020	4.353.162.198,00	3.539.641.704.355,00	0,12
2019	4.671.403.000,00	3.713.463.232.719,00	0,13
2018	4.198.225.625,00	7.022.008.567.570,00	0,06
2017	6.914.911.000,00	7.244.149.400.356,00	0,09
2016	2.958.150.000.00	2.945.695.415.740,00	0,1

Sumber: APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Proporsi anggaran program penelitian dan pengembangan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi berkisar antara 0.06%-0.13% dari besaran APBD. Fluktuasi besaran anggaran tersebut dapat diartikan belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah serta pemahaman yang utuh tentang kebermanfaatan kegiatan kelitbangan bagi pemerintah kabupaten itu sendiri. Besaran tersebut dirasa belum ideal karena litbang merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan seperti yang diamanatkan pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain melalui APBD Pemerintah Kabupaten, sebenarnya terdapat peluang alternatif sumber pembiayaan/pendanaan kelitbangan masih terbuka yang berasal dari anggaran non APBD Kabupaten Banyumas yaitu APBN melalui Kementerian/Lembaga maupun lembaga riset swasta dan luar negeri. Namun diperlukan kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dapat menangkap peluang pembiayaan tersebut salah satunya dengan memperluas jejaring, kapasitas sumber daya, regulasi dan lain sebagainya.

2.7.4 Kerjasama dan Jaringan

Untuk meningkatkan kinerja kelitbangan, diperlukan sinergi kelitbangan dengan berbagai elemen. Pemerintah daerah bukanlah aktor satu-satunya dalam

mendorong inovasi melalui kelitbangan. Ada aktor-aktor lain seperti perusahaan, perguruan tinggi, dan lainnya yang perlu dirangkul untuk sinergitas dan kerjasama.

Dalam rangka meningkatkan sinergi kegiatan, serta kapasitas kelitbangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas selama ini dilakukan kerjasama kelitbangan dengan stakeholders terkait. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappedalitbang melaksanakan kerjasama kelitbangan dengan berbagai stakeholders terkait baik Kementerian/Lembaga (K/L), perguruan tinggi negeri dan swasta, bisnis/dunia usaha maupun masyarakat.

Kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi bersinergi dengan salah satu fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi mitra kerjasama. Kerjasama yang telah terjalin antara Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan Bappedalitbang adalah kerjasama dalam melakukan penelitian, kajian, dan sebagai anggota jaringan penelitian. Kerjasama yang dilaksanakan dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam rangka sharing sumber daya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kelitbangan sebagai upaya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.

Tabel 2. 19 Daftar Mou Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PTN, PTS serta pemangku kepentingan kelitbangan lainnya Tahun 2016 – 2020

No	Tanggal Awal Sekepakatan	Tanggal Akhir Kesepakatan	Perguruan Tinggi	Nomor Kesepakatan Bersama
2016				
1	04/11/2015	03/11/2020	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto	890/23/2016 dan SHB/PER/016/0516 (10/05/2016)
2	10/05/2016	09/05/2021	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto	892/25/2016 dan 64/STIKOM/KL/201 6 (10/05/2016)
3	10/05/2016	09/05/2021	Akademi YLPP Purwokerto	892/24/2016 dan 385/L.30/AKBIDYL PP/V/2017 (10/05/2016)

No	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Perguruan Tinggi	Nomor Kesepakatan Bersama
2017				
1	13/01/2017	12/01/2022	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II	440/10/2017 dan HK.03.04/I/0281/20 17 (13/01/2017)
2	24/02/2017	23/02/2022	Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	440/12/TAHUN 2017 dan 0924/In.17/R/PP.06/ II/2017 (24/02/2017)
3	24/02/2017	23/02/2022	Politeknik Kesehatan Semarang	440/13/TAHUN 2017 dan HK.03.01/A.11.3/35 0/2017 (24/02/2017)
4	21/03/1017	20/03/2022	Akademi Keperawatan "YAKPERMAS " Banyumas	440/17/TAHUN 2017 dan 028/KS/AKPERYA K/IV/2017 (21/03/2017)
5	17/04/2017	16/04/2022	STMIK AMIKOM Purwokerto	423.4/21/TAHUN 2017 dan 008/K.01/STIMIK AMIKOM/IV/2017 (17/04/2017)
6	03/04/2017	02/04/2018	Akademi Maritim Nusantara Cilacap	440/35/2017 dan 810/D0/17.Se-7 (03/08/2017)
7	17/07/2017	16/07/2018	Pemkab dengan Universitas Nahdlatul	423/30/2017 dan Ybk.1271.08/030/82 3/UNUGHA/V/2017 (17/07/2017)

No	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Perguruan Tinggi	Nomor Kesepakatan Bersama
			Ulama Al Ghazali	
2018				
1	20/08/2018	19/08/2023	Universitas Jendral Soedirman Purwokerto	423/42/Tahun 2018 dan 8734/UN23/KS.00.0 0/2018 (20/08/2018)
2	08/03/2018	07/03/2020	Institut Teknologi Telkom Purwokerto	440/33/2018 dan Tel.639/MoU- 000/REK- 00/III/2018 (08/03/2018)
2019				
-	-	-	-	-
2020				
1	16/06/2020	15/06/2025	Institut Teknologi Telkom Purwokerto	IT Tel1943/MOU- 000/REK- 00/VII/20120 dan 420/39/2020 (16/06/2020)

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan program pembangunan daerah di bidang kelitbangan, maka kerjasama dengan pemerintah daerah lain merupakan suatu kebutuhan. Di dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh Lembaga Litbang, juga selalu melibatkan unsur pakar dari perguruan tinggi sesuai kompetensinya. Para pihak tersebut berperan sebagai tenaga ahli, reviewer maupun narasumber di dalam penelitian.

2.8 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan melalui diskusi kelompok terfokus bersama dengan perangkat daerah terkait, telaahan dokumen

terkait disertai dengan penilaian ahli (*experts judgment*), maka berikut ini ditampilkan potensi dan permasalahan bidang kelitbangan yang teridentifikasi sebagai berikut.

Tabel 2. 20 Potensi dan Permasalahan

Bidang	Potensi	Permasalahan
<i>Bidang Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik</i>	1. Tersedianya Mall Pelayanan Publik 2. Aparatur pemerintahan yang profesional dan mandiri 3. Tersedianya dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja	1. Belum optimalnya Indeks reformasi birokrasi 2. Belum optimalnya tingkat efektivitas kinerja (SAKIP) 3. Persentase PAD terhadap pendapatan masih rendah, Rasio penerimaan pajak terhadap PAD yang perlu ditingkatkan 4. Masih kurangnya kompetensi aparatur sipil negara dan belum optimal-nya penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan merit system. 5. Belum optimalnya pelayanan publik Perangkat Daerah yang berkualitas 6. Belum optimalnya Kapabilitas APIP 7. Belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah

Bidang	Potensi	Permasalahan
		8. Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	1. Tersedianya kelembagaan (PKH, TKSK, LPMK, PPL, PLKB, Lembaga Kemasyarakatan) 2. Tersedianya pelayanan kesehatan 3. Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan, termasuk dokter dan paramedis 4. Tersedianya Kartu Indonesia Pintar (KIP) 5. Tersedianya Kartu Indonesia Sehat (KIS)	1. Indeks Pembangunan Manusia belum optimal 2. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi 3. Angka Rata-rata lama sekolah masih rendah baru 7,82 yang seharusnya pendidikan dasar 9 tahun 4. APK SD sudah baik 98,77% namun APK PAUD 78,8% dan APK SMP 80,73% masih perlu perhatian 5. Angka partisipasi murni SMP masih perlu perhatian (80,73) 6. rasio guru terhadap murid untuk guru PNS masih rendah 7. Ketersediaan Puskesmas/Pustu belum terpenuhi kualitasnya sesuai standar Kesehatan 8. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan kecenderungan peningkatan angka

Bidang	Potensi	Permasalahan
		kesakitan pada penyakit tidak menular
		9. Angka Kematian Ibu masih tinggi
		10. Angka stunting sesuai Rakerkesmas masih tinggi
		11. Angka kematian balita masih tinggi
		12. Meningkatnya intensitas rawan bencana dan adanya potensi bencana gunung api
		13. Perlunya menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB)
		14. Angka kriminalitas masih tinggi sehingga mempengaruhi iklim investasi
		15. Penanganan kasus kejahatan, kriminalitas serta konflik sosial
		16. Belum optimalnya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu
		17. Masih tingginya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
		18. Tingginya jumlah Penyandang masalah

Bidang	Potensi	Permasalahan
		kesejahteraan sosial (PMKS) 19. Kesetaraan gender masih kurang, ditunjukkan dengan IDG rendah 20. Kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih tinggi 21. Masih kurangnya pencapaian kabupaten layak anak 22. Masih sedikitnya jenis kesenian yang dipentaskan 23. Kunjungan wisata masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan PAD
<i>Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah</i>	- Potensi yang dimiliki Kabupaten Banyumas, khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan pariwisata - Penanganan daerah rawan pangan - Adanya Dekramasda dan Aspikmas (Asosiasi pengusaha mikro, kecil, dan menengah Banyumas)	- Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan - Perlunya mengembangkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala perkotaan, kawasan dan komunal - Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan

Bidang	Potensi	Permasalahan
	4. Tersedianya infrastruktur wilayah	sumber air minum layak dan berkelanjutan.
	5. Banyaknya UMKM yang potensial	4. Perlunya mengembangkan mekanisme insentif penghematan air dan penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air
		5. Penurunan kualitas air karena peningkatan beban cemar dan sedimentasi akibat perubahan lahan mengancam ketersediaan sumber air baku
		6. Peningkatan layanan penanganan sampah mengakibatkan kapasitas tampung sampah TPA juga terbatas.
		7. Belum terpenuhinya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang ideal menyebabkan rendahnya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim mikro, jasa ekosistem kualitas udara, dan jasa ekosistem penyedia

Bidang	Potensi	Permasalahan
		keanekaragaman hayati di kawasan perkotaan
		8. Ancaman terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati dapat mengganggu produksi pangan, obat-obatan serta gangguan ekosistem secara luas
		9. Peningkatan ancaman dampak perubahan iklim dengan meningkatnya cuaca ekstrem dan pergeseran musim yang meningkatkan intensitas bencana dan gagal panen pada pertanian
		10. Ancaman penurunan lahan pertanian dan keanekaragaman hayati dapat mengganggu ketersediaan pasokan makanan bagi masyarakat
		11. Akses UMKM ke layanan keuangan masih kurang
		12. Produktivitas komoditas pertanian belum maksimal
		13. Pengelolaan dan penataan pasar daerah yang masih kurang

Bidang	Potensi	Permasalahan
		14. Pengelolaan limbah pasar masih kurang
		15. Perlunya Kesiapsiagaan krisis pangan
		16. Belum meratanya irigasi pertanian di sawah tadah hujan
		17. Perlu adanya kelembagaan ekonomi petani
		18. Belum terdapat peta potensi dan peluang investasi baik berdasarkan sektor unggulan maupun kewilayahan di Kabupaten Banyumas
		19. Pengelolaan dan penataan PKL yang masih rendah
		20. belum adanya Rencana Umum Jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas
		21. Tingginya volume lalu lintas dan perubahan tata ruang serta tingginya pembangunan di Perkotaan Purwokerto membutuhkan pengaturan transportasi yang memadai
		22. Belum tersedianya Standart Koefisien

Bidang	Potensi	Permasalahan
		Luasan parkir pada bangunan di Kabupaten Banyumas 23. Belum tersedianya Standart Tingkat Pertumbuhan Lalu Lintas di Kabupaten Banyumas 24. Belum tersedianya Standart Kapasitas Jalan di Kabupaten Banyumas 25. Belum tersedianya Standart Tingkat Pelayanan Jalan di Kabupaten Banyumas
<i>Bidang Inovasi dan Teknologi</i>	1. Adanya kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang mendukung pengembangan kelitbangan 2. Adanya komitmen dari Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan serta inovasi di Kabupaten Banyumas; 3. Adanya dukungan dari akademisi yang kompeten dan ahli di bidangnya 4. Tingginya kebutuhan kelitbangan dari Perangkat Daerah di	1. Indeks daya saing daerah (IDSD) yang belum optimal 2. Indeks inovasi Daerah belum optimal 3. Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM, khususnya belum adanya tenaga peneliti, perekayasa, analisis kebijakan dan tenaga pendukung kelitbangan sesuai dengan amanah peraturan penundangan 4. Belum tersedianya media publikasi di media cetak dan OJS (<i>open journal system</i>)

Bidang	Potensi	Permasalahan
	lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;	untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbang Kabupaten Banyumas;
	5. Kemudahan sinergitas antara Urusan litbang dan Urusan Perencanaan di Pemerintahan Kabupaten Banyumas dengan menerapkan hasil-hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan;	2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbang sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
	6. Adanya penguatan kebijakan kelitbang satu pintu	3. Belum optimalnya koordinasi kegiatan kelitbang antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
	7. Tersedianya produk inovasi	4. keterbatasan pagu anggaran yang dialokasikan daerah dalam mendukung kegiatan kelitbang;
		5. Belum tersedianya bank data yang lengkap dan akurat sebagai pendukung kegiatan kelitbang Kabupaten Banyumas;
		6. Terbatasnya kewenangan pemangku urusan kelitbang di pemerintah Kabupaten Banyumas karena masih berbentuk bidang (eselon III)

Bidang	Potensi	Permasalahan
		7. Kurangnya fasilitasi HKI dari Pemerintah Kabupaten 8. Kurangnya penelitian dan pengembangan guna menunjang inovasi dan pengembangan IPTEK, serta perbaikan kebijakan pembangunan daerah

2.9 Peluang dan Tantangan

Selain potensi dan permasalahan sebagaimana dijabarkan di atas, diidentifikasi juga peluang dan tantangan dalam pengembangan kelitbangan. Menggunakan pendekatan yang sama, maka berikut ini ditampilkan peluang dan tantangan bidang kelitbangan yang teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Peluang dan Tantangan

Bidang	Peluang	Tantangan
<i>Bidang Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik</i>	1. Adanya agenda reformasi 2. Melakukan pengembangan kompetensi secara periodik melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran terkait kompetensi teknis, manajerial, social 3. Konsisten dalam melaksanakan prinsip-prinsip merit sistem yaitu pendidikan dan	1. Tuntutan <i>good government clean government</i> dan <i>E-government</i> 2. Kurangnya perhatian dalam pengelolaan database dan standar kompetensi pegawai. 3. Kurang terkendalinya Sistem Manajemen ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah 4. Merosotnya kepercayaan publik pada pemerintah

Bidang	Peluang	Tantangan
	pelatihan, keterampilan, pengalaman, masa kerja dan etika dalam kebijakan penempatan PNS. 4. Unit organisasi pelayanan publik atau aparatur Pemerintah Daerah berpedoman dan diarahkan kepada peningkatan kualitas dan inovasi manajemen pelayanan 5. Iklim demokratis, keterbukaan atau transparansi.	5. Keterbatasan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 6. Tuntutan pelayanan publik yang transparan 7. Tuntutan bagi masyarakat untuk bisa mengakses layanan publik lebih praktis 8. Pencapaian target Kesepakatan Global (SDG's, MEA, AFTA, Konvensi Perubahan Iklim) sebagai pilar sosial
<i>Bidang Sosial dan Kemasyarakatan</i>	1. Menuntaskan program belajar Wajib Belajar 9 tahun dari Pemerintah 2. Partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu 3. Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan, termasuk dokter dan paramedis 4. Tersedianya pelayanan kesehatan 5. Peluang kerja sama dengan lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Masyarakat kurang tertarik dengan budaya Banyumas 2. Meningkatkan tertib Sistem informasi Administrasi Kependudukan 3. Pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas yang miskin dan rentan belum terpenuhi melalui jaminan social 4. Menurunkan jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Bidang	Peluang	Tantangan
	6. Hilirisasi kewirausahaan untuk menyelesaikan tingginya angka pengangguran pemuda 7. Kepariwisata dan Kebudayaan Banyumas dalam Persaingan Bisnis Ekonomi Kreatif 8. Adanya dokumen strategi mitigasi bencana	5. Peraturan tentang kesetaraan gender
<i>Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah</i>	1. Bekerjasama dengan institusi lain untuk mengembangkan bisnis industri kreatif 2. Akses permodalan bagi UMKM dengan pihak perbankan / KUR/ Dana Bergulir 3. Insentif pemerintah dan iklim usaha yang kondusif 4. Kerjasama dengan institusi lain untuk pembinaan UMKM dalam meningkatkan pengetahuan dan skill, bantuan peralatan 5. Kerjasama dengan institusi terkait untuk dapat mengakses peningkatan sarana dan prasarana bagi UMKM	1. Keinginan masyarakat untuk mengembangkan bisnis kreatif masih kurang 2. Kurangnya kesadaran UMKM untuk melakukan pengelolaan limbah 3. Pengelolaan pasar daerah dan potensi pendapatannya, revitalisasi pasar tradisional 4. Pengelolaan limbah pasar 5. Mengelola PKL / Penataan dan pembinaan di tempat yang diijinkan 6. Meningkatkan peran koperasi dalam bermasyarakat 7. Banyaknya pesaing yang menarik bagi produk

Bidang	Peluang	Tantangan
	6. Kemudahan ijin investasi dan kualitas pelayanan perizinan	UMKM dengan harga yang murah dan jumlah yang banyak
	7. Kerjasama dengan institusi terkait dalam pembinaan sertifikasi halal	8. Makin pentingnya upaya untuk melakukan kreatifitas dan inovasi dalam desain produk
	8. Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan aksesibilitas dan kondisi geografis yang strategis	9. Kekhawatiran produk UKM/IKM dengan barang berbahan plastik yang dihasilkan oleh perusahaan dalam atau luar negeri
	9. Insentif pemerintah, iklim usaha yang kondusif	10. Perdagangan bebas ASEAN
	10. Forum temu usaha untuk memfasilitasi IKM/UKM dengan pengusaha	11. Masuknya berbagai macam produk impor yang sejenis dari produk UKM/IKM dengan harga yang lebih murah
	11. Pengembangan Bandaran Jenderal Besar Soedirman	12. Trend, perilaku dan selera masyarakat/ konsumen yang terus berkembang/ berubah
	12. Pembangunan jalan tol	13. Perencanaan pengembangan klaster industri
	13. Potensi pasar yang besar bagi produk IKM/UKM di dalam dan luar negeri	14. Penggunaan teknologi untuk desain produk dan pemasaran produk yang semakin berkembang
	14. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan properti	15. Jumlah sektor potensi inovasi yang tergali dan potensi peluang investasi
	15. Pameran perdagangan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	

Bidang	Peluang	Tantangan
	16. Jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	
<i>Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek</i>	1. Tersedianya perguruan tinggi negeri dan akademisi kompeten yang berkualitas di Kabupaten Banyumas dalam mendukung kegiatan kelitbangan 2. Potensi sumber daya manusia yang kreatif, produktif serta komunitas beragam di Kabupaten Banyumas yang dapat mendukung kegiatan kelitbangan 3. Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan aksesibilitas dan kondisi geografis yang strategis 4. Peluang kerjasama kelitbangan dengan lembaga internasional 5. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pengembangan kelitbangan, dimulai dari Undang-undang hingga Peraturan Menteri	1. Tuntutan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga litbang diharapkan dapat memberikan rekomendasi perumusan kebijakan yang implementatif dan tepat sasaran untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan 2. Munculnya isu dan persoalan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi multisektoral dalam upaya penyelesaiannya. 3. Kesepakatan global (SDG's, MEA, AFTA, konvensi perubahan iklim) 4. Ego sektor, ego institusi kelitbangan 5. Paradigma <i>Innovation driven economy</i> 6. Implementasi regulasi, minat ASN rendah terhadap jabatan fungsional peneliti

Bidang	Peluang	Tantangan
	6. Terbuka lebar untuk membangun jejaring dan kerjasama kelitbangan dengan perguruan tinggi, pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten lainnya serta pihak swasta 7. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat; 8. Regulasi ASN mendorong jabatan fungsional peneliti 9. Meningkatkan jumlah penelitian dan kajian dalam bidang inovasi dan pengembangan IPTEK serta perbaikan kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan OPD, organisasi, dan instansi yang terkait 10. Regulasi pemerintah dan iklim inovasi	7. Akses permodalan, akses pasar, persaingan usaha (inovasi) 8. Komitmen stakeholders dalam penggunaan hasil kelitbangan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan juga merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

1. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategik. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.

Saat ini kinerja pembangunan dihadapkan pada isu-isu dan tantangan global, nasional dan daerah. Isu global terkait dengan pergeseran poros ekonomi dan politik global, kesepakatan perdagangan bebas (MEA, AFTA, NAFTA) yang menciptakan iklim kompetitif. Tantangan global lainnya adalah 17 tujuan pembangunan millenium, yaitu: 1) menghapus kemiskinan; 2) mengakhiri kelaparan; 3) kesehatan dan kesejahteraan; 4) kualitas pendidikan yang baik; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi; 7) akses ke energi yang terjangkau; 8) pertumbuhan ekonomi; 9) inovasi dan infrastruktur; 10) mengurangi ketimpangan; 11) pembangunan berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13) mencegah dampak perubahan iklim; 14) menjaga sumber daya laut; 15) menjaga ekosistem darat; 16) perdamaian dan keadilan; dan 17) revitalisasi kemitraan global.

Selain itu, kita juga dihadapkan pada era "*Disruption*", dimana akumulasi perubahan ekologi secara dramatis dan meningkatnya persaingan global, yang

salah satunya didorong oleh teknologi informasi (TIK), menciptakan sistem yang saling terkait dan ditandai dengan perubahan menuju situasi *simpler* (lebih mudah), *cheaper* (lebih murah), *accessible* (lebih terjangkau), dan *faster* (lebih cepat).

Di tingkat Nasional, kita juga menghadapi 9 (sembilan) tantangan utama, yaitu: 1) stabilitas politik dan keamanan; 2) tata kelola pemerintahan: birokrasi yang efektif dan efisien; 3) pemberantasan korupsi; 4) pertumbuhan ekonomi; 5) percepatan pemerataan dan keadilan; 6) keberlanjutan pembangunan; 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia; 8) kesenjangan antar wilayah; dan 9) percepatan pembangunan kelautan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera
2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang mandiri
3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang maju dan berdaya saing
4. Terwujudnya daerah Kabupaten Banyumas yang lestari

Pada periode 2019 – 2025 masuk dalam tahapan keempat pelaksanaan RPJPD tersebut yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera, mandiri, maju dan berdaya saing, dan lestari melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kabupaten Banyumas yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera

1) Kependudukan

- Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kependudukan;
- Peningkatan pengaturan distribusi (insentif dan disinsentif) penduduk sesuai Perda Tata Ruang Wilayah;
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi program Keluarga Berencana.

2) Pendidikan

- Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- Pengembangan kurikulum;
- Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam pembangunan kualitas SDM.

3) Kesehatan

- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular;
- Peningkatan kualitas pelayanan Poliklinik Perdesaan;
- Peningkatan pelayanan bidan dan bidan desa secara menyeluruh;
- Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.

4) Ketenagakerjaan dan Pengangguran

- Peningkatan kualitas balai pelatihan kerja industri, jasa dan pertanian;
- Pengurangan pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja.

5) Penanggulangan Kemiskinan

- Melanjutkan pelaksanaan program Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan;
- Melanjutkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)
- Melanjutkan pengembangan jaringan kemitraan penanggulangan kemiskinan.

6) Pemberdayaan Perempuan

- Melanjutkan peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam segala kegiatan pembangunan.

2. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri

1) Ekonomi

- Melanjutkan perkuatan operasional ekonomi kerakyatan;
- Melanjutkan perkuatan manajemen lembaga ekonomi kerakyatan.

2) Perdagangan

- Melanjutkan pengembangan pusat-pusat perdagangan baik lokal maupun regional;
- Melanjutkan pengembangan jaringan distribusi wilayah;
- Melanjutkan peningkatan pelayanan pengembangan usaha distribusi baik lokal maupun regional.

3) Pariwisata

- Peningkatan pelayanan angkutan wisata ke obyek-obyek wisata;
- Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan obyek dan atraksi wisata;
- Pengembangan pengelolaan kawasan wisata Banyumas Selatan secara terpadu (wisata alam dan wisata budaya);
- Melanjutkan pengembangan Paket Wisata Regional;

- Melanjutkan peningkatan publikasi dan promosi wisata tingkat regional, nasional maupun internasional.

4) Pertanian

- Peningkatan produktivitas perluasan daerah irigasi teknis;
- Melanjutkan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian lahan basah;
- Melanjutkan pengembangan kualitas produk agropolitan;
- Melanjutkan pengembangan manajemen agrowisata;
- Melanjutkan pengembangan agroindustri.

5) Industri

- Melanjutkan pengembangan industri pengolahan produk pertanian;
- Melanjutkan pengembangan kuantitas dan kualitas produk industri rumah tangga.

6) Koperasi

- Melanjutkan pengembangan koperasi produksi industri rumah tangga.

7) Pertambangan dan Energi

- Melanjutkan pelayanan mekanisasi penambangan galian golongan C;
- Melanjutkan pengembangan listrik mikro hidro;
- Melanjutkan pengembangan bioenergi.

3. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing

1) Kependudukan

- Melanjutkan pengembangan Manajemen Sistem Informasi kependudukan

2) Kualitas SDM

- Melanjutkan peningkatan pelayanan dalam peningkatan pendidikan ke luar negeri;
- Melanjutkan penguasaan teknologi informatika.

3) Politik, hukum dan pemerintahan

- Mempertahankan situasi politik yang kondusif;
- Peningkatan kualitas, fungsi dan peran Legislatif;
- Peningkatan pelaksanaan *good governance*;

4) Sarana dan Prasarana Wilayah

- Peningkatan kondisi jalur prasana dan sarana transportasi ke pusat-pusat kegiatan masyarakat;
- Pembangunan jaringan prasarana dan sarana irigasi;

- Pengembangan pembangunan mikro hidro;
 - Melanjutkan peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi.
- 5) Olahraga dan kebudayaan
- Melanjutkan peningkatan pelayanan peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olah raga;
 - Melanjutkan peningkatan pelayanan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya khas Banyumas;
 - Peningkatan pelayanan peran serta masyarakat dalam perlindungan benda cagar budaya.

4. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

- 1) Keberlanjutan pembangunan
- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - Penyusunan Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya;
 - Penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya.
- 2) Lingkungan hidup
- Melanjutkan antisipasi bencana alam di kawasan rawan bencana;
 - Melanjutkan peningkatan pelayanan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan terasering di area belum terbangun;
 - Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam penanaman pohon di area konservasi.
- 3) Penataan ruang wilayah
- Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
 - Melanjutkan evaluasi dan revisi perda tentang RDTR Kawasan Perkotaan secara periodik;
 - Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam penyusunan *Neighbourhood Development*.

Sedangkan pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dan akan dilakukan

perubahan pada tahun 2021-2023 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan.
 - b. Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi.
 - c. Meningkatkan sistem pengendalian kebijakan daerah, pengawasan, dan pencegahan KKN di lingkungan pemerintah
 - d. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya pemekaran wilayah
 - f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pelibatan aktif masyarakat dan tenaga ahli dalam proses perencanaan dan penganggaran.
 - g. Meningkatkan kualitas, sinergitas dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menggunakan e-planning dan e-budgeting
 - h. Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan, dan mendorong seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan arsip secara baku dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai.
 - i. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam hal perencanaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan.
 - j. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
 - k. Meningkatkan penerapan standar pelayanan, dan meningkatkan kompetensi petugas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perijinan.
 - l. Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan secara terpadu, dan dengan penerapan standar pelayanan.
 - m. Mengembangkan sistem jaringan komunikasi dan informatika
 - n. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi government

2. Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mendorong partisipasi seluruh anak usia sekolah untuk bersekolah dengan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan optimalisasi pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah.
 - b. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar sesuai standar nasional.
 - c. Meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dengan mendorong akreditasi sekolah
 - d. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan sesuai kebutuhan, terutama ruang kelas, perpustakaan, laboratorium.
 - e. Memberikan bantuan pendidikan untuk penyelesaian program sarjana
 - f. Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional.
 - g. Meningkatkan status gizi masyarakat serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - h. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, meningkatkan kompetensi petugas kesehatan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.
 - i. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dan anak.
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar
 - c. Meningkatkan perlindungan bagi penduduk miskin, dan mendorong penumbuhan usaha ekonomi produktif penduduk miskin.
 - d. Meningkatkan pengembangan kewirausahaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non produktif
 - e. Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.
 - f. Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya pertanian,
 - b. Meningkatkan penyediaan sarana produksi budidaya, optimalisasi pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) komoditas unggulan perikanan
 - c. Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, penerapan teknologi budidaya pertanian komoditas unggulan pertanian
 - d. Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian dan hasil peternakan agar memiliki nilai tambah ekonomi.
 - e. Meningkatkan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dan pembinaan terhadap petani penderes agar menerapkan standar keselamatan.
 - f. Meningkatkan jumlah pelaku ekspor gula kelapa
 - g. Meningkatkan kualitas dan jumlah produk gula kelapa sesuai standar ekspor.
 - h. Meningkatkan keselamatan petani penderes dengan *safety belt*
 - i. Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk
 - j. Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama perdagangan.
 - k. Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
5. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan produksi padi dengan penyediaan saprodi, penggunaan teknologi pertanian, dan pembinaan kelompok tani secara berkelanjutan.
 - b. Mendorong sinergi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan.
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga/ pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.
 - d. Meningkatkan panganekaragaman pangan dengan memanfaatkan lahan

- untuk penyediaan bahan pangan lokal.
 - e. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi serta penerapan teknologi tepat guna sektor pertanian.
 - f. Memfasilitasi penyediaan lumbung pangan dan jalan usaha tani
 - g. Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian
6. Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, khususnya kawasan industri
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK).
 - d. Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya.
 - e. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kawasan peruntukan industri dan kawasan industri
 - f. Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup
 - g. Mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat
 - b. Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase
 - c. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu
 - d. Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan
 - e. Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah dengan membangun terminal penumpang
 - f. Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumber daya air
 - g. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta penataan saluran drainase,

- revitalisasi jaringan irigasi dan embung.
 - h. Membangun pusat kantor pemerintahan terpadu
 - i. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman kumuh, dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum.
 - j. Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu
 - k. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM dan manajemen transportasi umum yang terintegrasi.
 - l. Meningkatkan dukungan pembiayaan infrastruktur jalan dan irigasi dari dana di luar APBD kabupaten
 - m. Melakukan penyusunan regulasi untuk pembiayaan infrastruktur melalui anggaran desa
8. Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengembangkan destinasi wisata yang memiliki keunikan/kekhasan, memberdayakan pelaku jasa wisata profesional dalam pengembangan paket wisata, dan memberdayakan kelompok sadar wisata.
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.
 - c. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mendorong pengembangan industri kreatif pada usaha yang pertumbuhannya masih rendah
 - d. Menumbuhkembangkan usaha kreatif pemula (start up), dan mendorong pemasaran produk ekonomi kreatif di tingkat nasional maupun global
 - e. Meningkatkan kuantitas dan kapabilitas kelompok sadar wisata desa
 - f. Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
 - g. Mengembangkan ketrampilan pelaku UMKM, IKM, koperasi dan pengembangan pasar desa dan usaha ekonomi perdesaan berbasis potensi sumber daya lokal
 - h. Meningkatkan promosi, jumlah pelatihan, akses permodalan, dan akses pemasaran untuk wirausaha muda.
 - i. Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara lembaga perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan industri dan UMKM
 - j. Melakukan penyusunan rencana induk kelitbangan (RIK)
9. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, yang memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Mewujudkan Gerakan Memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-

- tempat ibadah lainnya dengan memberikan bantuan untuk marbot masjid dan penjaga tempat ibadah lainnya serta layanan kesehatan untuk santri pesantren
- b. Meningkatkan pemberian bantuan layanan kesehatan dan pendidikan, tunjangan makan untuk anak yatim/yatim piatu dan berkebutuhan khusus/Difabel
 - c. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.
 - d. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat
 - e. Meningkatkan penegakan Perda/ Perbup dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi yustisi dengan melibatkan lembaga terkait.
 - f. Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan pengembangan prestasi dan karakter pemuda.
 - g. Meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan kompetensi pelatih dan pembinaan atlet, serta membudayakan olahraga pada masyarakat
 - h. Melestarikan seni dan budaya dengan memfasilitasi aktualisasi nilai adat dan tradisi masyarakat, serta memfasilitasi pementasan seni budaya.
 - i. Meningkatkan pelestarian/revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.

Tabel 3.1 Sandingan Arah Kebijakan RPJPD dengan RPJMD

Arah Kebijakan		
No	RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2025	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
1.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju
2.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang mandiri	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang Adil Makmur
3.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang maju dan berdaya saing	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyumas yang Mandiri
4.	Terwujudnya daerah Kabupaten Banyumas yang lestari	

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka disusunlah Analisa isu strategis Pembangunan Kabupaten Banyumas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 1 Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan 11. Kota dan Permukiman 12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 13. Perubahan iklim 14. Sumber daya kelautan 15. Ekosistem daratan 16. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun	1. Stabilitas politik dan keamanan 2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien 3. Pemberantasan korupsi 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Percepatan pemerataan dan keadilan 6. Keberlanjutan pembangunan 7. Peningkatan kualitas SDM 8. Kesenjangan antar wilayah 9. Percepatan pembangunan kelautan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam 5. Kedaulatan pangan dan energi 6. Kesenjangan wilayah 7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	1. Kualitas Sumber daya Manusia 2. Ketersediaan Infrastruktur 3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 4. Kemiskinan dan Pengangguran 5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 7. Tata Kelola Pemerintahan

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
kelembagaan 17. Kemitraan global			

Dengan mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan daerah isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia untuk peningkatan sumber daya manusia telah menjadi kesadaran bersama karena dengan persaingan yang semakin terbuka hanya sumber daya manusia yang kualitas yang bisa bersaing.

Peluang bonus demografi hanya bisa diraih dengan peningkatan sumber daya manusia, banyaknya penduduk usia produktif yang berkualitas akan mampu bersaing dan mandiri, serta mampu bekerja dan menabung untuk meningkatkan investasi. Sebaliknya meningkatnya usia produktif namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan menjadi beban dan melahirkan lingkaran kemiskinan berikutnya.

Kualitas sumber daya manusia akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat utama untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat berkelanjutan.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong pengembangan wilayah dengan meningkatkan produktivitas wilayah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat, membuka peluang bagi pengembangan potensi wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan. Namun demikian kinerjanya perlu dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan air untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi padi sebagai sumber pangan utama. Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang menentukan kedaulatan negara dan bangsa.

Penyediaan infrastruktur dasar air minum, sanitasi, dan perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk di wilayahnya. Cakupan pelayanan infrastruktur dasar di

Kabupaten Banyumas belum menjangkau seluruh penduduk. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna memberikan akses menyeluruh air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni bagi penduduk Kabupaten Banyumas. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi semakin penting karena merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Kabupaten Banyumas memiliki berbagai potensi daerah yang dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa sumber daya alam, penduduk sebagai sumber tenaga kerja, sumber daya buatan yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun sumber daya sosial yang berupa kelembagaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pengembangan seluruh potensi atau sumber daya tersebut dapat menciptakan berbagai peluang usaha untuk dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat, dan diharapkan akan menimbulkan dampak ikutan (*multiplier effect*) yang luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mampu mengidentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkannya secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah akan menyebabkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan daerah karena keterbatasan pendapatan daerah, lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya.

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan akar berbagai permasalahan pembangunan. tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal

tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyumas belum mampu meningkat secara signifikan, salah satu penyebabnya adalah ketersediaan, penggunaan dan keterjangkauan sarana pendukung oleh petani belum optimal. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap.

Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu menjadi pelopor kedaulatan Kedaulatan Pangan, yaitu secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan dan Ketahanan Pangan menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika produktivitas pertanian dapat dioptimalkan.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu utama dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun dimensi pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait lingkungan, sebagaimana 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan dan hukum dan tata kelola. Hal ini menggambarkan bahwa keberlanjutan pembangunan bahkan keberlanjutan hidup manusia bergantung pada keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Proses produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga harus diupayakan agar meminimalkan emisi GRK dan limbah, bahkan jika memungkinkan dilakukan sistem produksi terpadu tanpa limbah (*Zero waste*). Sementara pengelolaan sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia diupayakan terus dikurangi mulai dari sumbernya.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di suatu daerah. Tanpa tata kelola yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping komitmen, kualitas sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi khususnya teknologi informasi serta mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) juga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun demikian infrastruktur pendukung penerapan e-government tersebut sampai saat ini belum optimal.

Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal dengan penggunaan anggaran yang makin efektif dan efisien pembangunan dan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai arah kebijakan pembangunan pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 khususnya periode RPJMD ketiga yang mengamanatkan untuk dilakukan pengusulan pembentukan Kota Purwokerto, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan beberapa upaya agar dapat memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun secara teknis untuk pengusulan pembentukan Kota Purwokerto.

3.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Banyumas

3.1.2.1 Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Berdasarkan kondisi dan analisis potensi daerah maka Visi Kabupaten Banyumas 2005-2025 adalah **“BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”**.

1. Banyumas

Banyumas adalah salah satu wilayah kabupaten di antara 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. 2025

2025 adalah angka tahun terakhir dari masa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Sejahtera

Secara harafiah, sejahtera (kesejahteraan) adalah suatu kondisi dengan semua kebutuhan hidup minimal secara wajar dapat terpenuhi. Menurut teori Maslow, kebutuhan hidup manusia teriri atas selain kebutuhan fisik yang berupa: sandang, pangan, papan dan kesehatan, juga kebutuhan psikhis/emosional, seperti: rasa aman, hubungan sosial, penghargaan diri, aktualitas diri, yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Menurut para ahli Hukum Adat Indonesia bahwa kebutuhan hidup masyarakat adat (Indonesia) adalah terjadinya harmonisasi (selaras, serasi dan seimbang) hubungan antara

manusia (individu) dengan: (a) Tuhan-nya, (b) lingkungan alam, (c) sesama manusia di lingkungannya. Banyumas yang sejahtera mempunyai arti bahwa di Wilayah Kabupaten Banyumas di tahun 2025 akan terealisasi harmonisasi hubungan antara manusia, lingkungan alam, masyarakat (lingkungan sosial), Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing) untuk terpenuhinya segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis) masyarakat secara wajar.

4. Mandiri

Secara harafiah, kata mandiri berarti bahwa semua urusan ditangani sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang bersangkutan mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri atau rumah tangganya sendiri, atau mempunyai otonomi. Namun disadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Melalui daya analisisnya masing-masing mengetahui kelebihan dan kekurangan. Karenanya dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah akan berhubungan dengan orang lain untuk saling memberi dan menerima guna menutup kekurangan dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya.

5. Maju dan Berdaya saing

Maju dan berdaya saing merupakan satu ungkapan yang tidak terpisahkan. Secara harafiah maju berarti berwawasan ke depan, sedangkan berdaya saing berarti mempunyai kualitas yang kompetitif. Dengan demikian maju dan berdaya saing adalah suatu kondisi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif.

6. Lestari

Secara harafiah lestari adalah suatu kondisi yang tidak berubah, bertahan, kekal, seperti keadaan semula. Namun di sisi lain lestari juga mengandung arti suatu dinamika yang tidak pernah berhenti atau dihentikan kecuali Tuhan yang menghendakinya. Pada hakekatnya, kegiatan membangun merupakan suatu proses yang berusaha merubah suatu kondisi (sebagai kondisi awal) dengan segala hambatan dan tantangan, sedemikian rupa sehingga akan diperoleh sesuatu kondisi, yang mempunyai nilai guna atau suatu kondisi yang lebih dalam memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan manusia sebagai tujuan atau produknya. Di sisi lain hidup dan kehidupan adalah suatu dinamika yang terus berkembang sejalan perkembangan hidup itu sendiri.

3.1.2.2 Misi

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera

Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).

2. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri

Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.

3. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing

Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperanserta secara aktif di dunia internasional.

4. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, yaitu

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi RPJMD

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

Misi ini merupakan pelaksanaan dari hasta krida pertama yaitu Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah untuk mewujudkan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik; dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedua yaitu pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan 92 paket beasiswa, program wajib belajar, peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, dan program 1 desa 3 sarjana. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketiga yaitu pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan safety belt penderes, durian, dll. Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keempat yaitu Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan produksi padi 500.000 ton/tahun. Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kelima yaitu Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 enterpreneur muda, investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri. Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keenam yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan hotmix 570 km, dan membangun pasar desa. Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketujuh yaitu menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM. Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kedelapan yaitu gerakan memakmurkan pesantren dan masjid untuk mewujudkan bantuan untuk Marbot masjid, KBS untuk santri pesantren, serta KBS, KBP dan

tunjangan makan untuk yatim piatu. Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 3. 3 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Visi/Misi	RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023
<i>Visi</i>	Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari	Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri
<i>Misi</i>	1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera	1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
	2. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Mandiri	2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
	3. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
	4. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera	4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
		5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
		6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai

Visi/Misi	RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-
		2023
		sebagai daya ungkit pembangunan
		7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
		8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah menjelaskan mengenai arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Banyumas dan strategi kelitbangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2021-2023. Kedua hal tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.

3.2.1 Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamatkan secara jelas mengenai pentingnya fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di lingkup Pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, kegiatan kelitbangan di kabupaten/kota meliputi kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama meliputi 7 kegiatan yaitu, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualits hasil, outcome, dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau

mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, Kelitbangan pendukung dilalui dengan proses peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, serta pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Kelitbangan pendukung sangat penting perannya untuk menopang pelaksanaan kelitbangan utama.

Sinergitas antara kegiatan kelitbangan utama dan kegiatan kelitbangan pendukung dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala Isu strategis bidang.

Tabel 3. 4 Jenis Kelitbangan Utama dan Keluarannya

No	Jenis Keluaran	Keluaran
1.	Penelitian	Rekomendasi
2.	Pengkajian	Rekomendasi
3.	Pengembangan	Naskah Akademik, Rancangan regulasi, pemodelan kebijakan/Program
4.	Perekayasaan	Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan
5.	Penerapan	Uji coba model kebijakan/program pada daerah percontohan
6.	Pengoperasian	Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas (menyeluruh) dan pendampingan
7.	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi (Lanjut dengan perbaikan atau dicabut)

Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016

Arah kebijakan dimaksudkan sebagai panduan bagi Bidang Litbang Bappedalitbang secara khusus, dan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kelitbangan sehingga senantiasa berorientasi pada tujuan utama dari kelitbangan itu sendiri, yaitu mendorong inovasi daerah. Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan i) dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2018 - 2023, ii) arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah

jangka panjang, serta iii) arah kebijakan dan strategi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditetapkanlah arah kebijakan dan strategi kelitbangan Kabupaten Banyumas untuk periode 2021-2023 sebagai berikut:

1. Penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dengan jaminan mutu hasil kelitbangan.
2. Meningkatkan jejaring (*networks*) dan kolaborasi dengan aktor - aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta.
3. Mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk perekayasaan maupun evaluasi kebijakan.
4. Menumbuhkembangkan iklim dan mendorong inovasi-inovasi dari masyarakat, khususnya dalam bentuk aplikasi dan teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kinerja lembaga kelitbangan daerah dengan mendorong penguatan aspek SDM dan pembiayaan.

Arah Kebijakan pertama merupakan landasan awal dukungan kegiatan kelitbangan dalam pencapaian strategi di seluruh misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas 2018-2023. Hasil penelitian dan pengembangan yang akurat, baik dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Kegiatan kelitbangan terdiri dari tujuh rangkaian yang berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: 1) penelitian; 2) pengembangan; 3) pengkajian; 4) perekayasaan; 5) Penerapan; 6) pengoperasian; dan 7) evaluasi kebijakan.

Keseluruhan rangkaian kegiatan kelitbangan di Kabupaten Banyumas diarahkan pada upaya pemecahan masalah yang dapat mendorong ketepatan rekomendasi untuk strategi dan kebijakan dalam mendukung pembangunan daerah.

Arah Kebijakan kedua dalam hal jejaring, pembiayaan dan kolaborasi, arah kebijakan kedua ini sesuai dengan strategi dari misi pertama, yaitu “meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pelibatan aktif masyarakat dan tenaga ahli dalam proses perencanaan dan penganggaran” dengan mendorong peningkatan pelibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan daerah serta pengembangan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah.

Arah kebijakan kelitbangan yang ketiga adalah mendorong agar kebijakan pemerintah daerah dapat berbasis kelitbangan. Hasil litbang diarahkan

untuk menjadi dasar dalam formulasi dan penerapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Pentingnya peran litbang sesuai dengan konsep manajemen strategis, yaitu peran litbang dalam melakukan pemindaian kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*). Dalam konteks manajemen pembangunan, hasil litbang dapat dijadikan *proxy*, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, maupun pengawasan pembangunan.

Hasil litbang harus menjadi masukan dan landasan dalam penentuan kajian prioritas penelitian dan pengembangan selanjutnya. Hasil litbang penting untuk dapat dengan mudah diakses oleh publik, tidak hanya di Kabupaten Banyumas namun secara global untuk dapat mendorong berkembangnya kegiatan penelitian baru untuk penyelesaian permasalahan pembangunan, tidak hanya di ibu kota Purwokerto, namun juga kewilayahan secara menyeluruh.

Arah kebijakan keempat merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pembangunan daerah dengan upaya pemecahan permasalahan daerah melalui inovasi-inovasi daerah. Inovasi daerah diarahkan untuk fokus pada inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, bidang pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya yang sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertujuan untuk menunjang pembangunan di daerah. Upaya mendorong inovasi sebagai arah kebijakan keempat diperlukan dalam menciptakan peluang-peluang baru dan pembaharuan dalam mengelola tata pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan strategi kerja di semua misi Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2023. Inovasi dalam kelitbangan merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, inovasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta peran peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Inovasi daerah yang dilakukan untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah, tata kelola sumber daya aparatur, tata kelola pelayanan publik, serta pemecahan masalah pembangunan daerah. Kegiatan inovatif dapat memberikan masukan strategis dalam penyusunan kebijakan inovasi daerah yang bersifat holistik-tematik, integratif dan spasial terutama untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Integrasi inovasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran juga penting untuk menjamin

keberlanjutan inovasi daerah.

Arah Kebijakan Kelima berfokus untuk mempersiapkan kelembagaan kelitbangan menjadi garda terdepan sebagai lembaga *think tank* dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan kelima mengenai penguatan kinerja lembaga kelitbangan juga sesuai dengan strategi pencapaian misi pertama. Penguatan aspek sumber daya manusia dan pembiayaan sesuai dengan strategi pada misi pertama “perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan strategi yang berfokus pada reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, pencegahan KKN, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas, sinergitas dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

3.2.2 Strategi Kelitbangan Daerah

Berdasarkan pada arah kebijakan kelitbangan, maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Kabupaten Banyumas dapat tercapai. Strategi tersebut adalah :

A. Arah Kebijakan Pertama

“Penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dengan jaminan mutu hasil kelitbangan”

Strategi-strategi untuk arah kebijakan pertama adalah :

- a. Menggunakan hasil-hasil pemetaan masalah pada dokumen-dokumen perencanaan atau kajian eksisting sebagai basis utama dalam merencanakan kegiatan-kegiatan kelitbangan;
- b. Menghimpun dan memetakan beragam masalah, isu strategis serta kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas sembari tetap memperhatikan keterkaitannya dengan isu-isu global terkini;
- c. Merumuskan tema prioritas serta target output di setiap bidang fokus kelitbangan. Penentuan bidang adalah berdasarkan pada apa yang telah diatur dalam Permendagri 17/2016 yaitu bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, bidang sosial dan kemasyarakatan, bidang ekonomi dan pembangunan daerah, dan bidang inovasi dan pengembangan iptek. rencana kelitbangan untuk 3 (tiga) tahun kedepan merupakan kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- d. Melaksanakan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah;

- e. Menetapkan indikator keluaran baku sesuai standar pelaporan kelitbangan bagi seluruh pelaku kelitbangan;
- f. Mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan partisipasi publik untuk dapat turut memvalidasi/menguji hasil-hasil kelitbangan, misalnya melalui skema seminar hasil penelitian;
- g. Mengembangkan fasilitas kelitbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan mendorong serta memfasilitasi penempatan fasilitas kelitbangan pemerintah pusat di daerah;
- h. Melakukan sertifikasi unit-unit pengujian yang terkait dengan kelitbangan dan kompetensi pelaksana pada unit tersebut.

B. Arah Kebijakan Kedua

“Meningkatkan jejaring (*networks*) dan kolaborasi dengan aktor – aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta”

Strategi-strategi untuk arah kebijakan kedua adalah :

- a. Sosialisasi rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kabupaten Banyumas kepada berbagai level dan lingkup *stakeholders* mulai dari lembaga pemerintah kementerian maupun non kementerian maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga riset/kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi hingga ke komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan melalui berbagai forum serta berbagai media komunikasi baik media elektronik maupun media cetak dan temu muka dengan para mitra;
- b. Membangun kesepahaman bersama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kelitbangan daerah dan mewujudkan dalam bentuk konsorsium riset daerah;
- c. Mengembangkan kemitraan seperti *joint research*, *joint production* dan *joint development* melalui konsorsium riset daerah untuk lingkup nasional maupun internasional;
- d. Mengembangkan skema insentif bagi para peneliti luar untuk dapat melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Banyumas dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
- e. Memberikan dukungan bagi aktivitas-aktivitas publikasi hasil-hasil kelitbangan di daerah pada forum-forum nasional dan/atau internasional yang relevan.

C. Arah Kebijakan Ketiga

“Mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk perekayasaan maupun evaluasi

kebijakan”

Strategi-strategi untuk arah kebijakan ketiga adalah :

- a. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang;
- b. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Memperluas diseminasi hasil-hasil kelitbangan melalui penyelenggaraan *event* (konferensi, seminar, simposium, *workshop*) atau penggunaan media, baik populer maupun ilmiah;
- d. Meningkatkan penyerapan hasil-hasil kelitbangan yang berorientasi pada hilirisasi industri oleh pelaku industri untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memiliki nilai tambah lebih;
- e. Meningkatkan penerapan hasil-hasil kelitbangan khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang berkontribusi penting dalam perekonomian;
- f. Meningkatkan kemudahan pelayanan pendaftaran paten dan hak cipta serta bantuan advokasi hukum bila ada permasalahan terkait dengan paten dan hak cipta tersebut;
- g. Mengembangkan basis data (*database*) dan sistem informasi manajemen terkait data dan informasi daerah, hasil-hasil kelitbangan daerah, publikasi ilmiah, paten dan HKI untuk mendukung diseminasi dan evaluasi agenda, prioritas, dan program kelitbangan.

D. Arah Kebijakan Keempat

“Menumbuhkembangkan iklim dan mendorong inovasi-inovasi dari masyarakat, khususnya dalam bentuk aplikasi dan teknologi tepat guna”

Strategi-strategi untuk arah kebijakan keempat adalah :

- a. Merevitalisasi dan memperkuat sistem inovasi daerah (SiDa) sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas dan keinovasian di tingkat daerah, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan rencana induk kelitbangan daerah;
- b. Membangun budaya inovasi dan kreativitas melalui strategi jangka panjang melalui sistem pendidikan dan pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pelatihan, serta melalui strategi jangka pendek melalui pengembangan ekosistem *technopreneur*, inkubator inovasi kelitbangan dan bisnis, ruang-ruang diskusi IPTEK, penciptaan *role model*, penyediaan beragam bentuk insentif, dan apresiasi;

- c. Mendorong penyusunan regulasi-regulasi daerah yang mendukung penumbuhkembangan iklim inovasi di masyarakat;
- d. Mengembangkan skema insentif, misalnya dalam bentuk penghargaan rutin, bagi para inovator-inovator lokal yang karyanya telah/dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat atau sistem royalti sebagai hak atas kekayaan intelektual;
- e. Menggalang dukungan pemerintah provinsi dan pusat, sektor swasta, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk penciptaan ruang-ruang inovasi berupa *techno park* dan/atau *science park* sebagai pusat penerapan teknologi, pusat diseminasi, dan penumbuhan usahawan (*entrepreneur*);
- f. Fasilitasi usahawan-usahawan muda melalui dukungan keikutsertaan mereka pada forum-forum *startup* (usaha-usaha rintisan yang sebagian besar diinisiasi oleh generasi muda) pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Dewasa ini, pertumbuhan *startup* di Indonesia begitu pesat seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi;
- g. Mengikutsertakan materi-materi kelitbangan dalam kegiatan-kegiatan lain di daerah yang bersifat massal dan kesenangan seperti festival, bazaar, pameran, lomba dan sebagainya guna meningkatkan apresiasi dan ketertarikan kepada kelitbangan daerah;
- h. Mendorong pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah;
- i. Mendorong pemanfaatan inovasi masyarakat dan swasta untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

E. Arah Kebijakan Kelima

“Meningkatkan kinerja lembaga kelitbangan daerah dengan mendorong penguatan aspek SDM dan pembiayaan”

Strategi-strategi untuk arah kebijakan kelima adalah :

- a. Melakukan pemetaan keahlian yang diperlukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga peneliti di masa yang akan datang;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan yang produktif, berkompeten dan handal melalui pendidikan, pelatihan, studi komparasi, magang, dan keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (seminar, konferensi);
- c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti;
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga kelitbangan daerah melalui pemenuhan sarana dan prasarana bidang kelitbangan, penyusunan rencana kerja kelitbangan yang mantap dan tepat waktu, serta penumbuhan budaya kerja

yang kondusif;

- e. Meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan sehingga hasil-hasil kelitbangan dapat komplementer satu sama lain;
- f. Melakukan sertifikasi kompetensi dan/atau memfasilitasi keanggotaan asosiasi profesi bagi para pelaku kelitbangan daerah;
- g. Meningkatkan kesejahteraan pelaku kelitbangan daerah sehingga meningkatkan apresiasi dan loyalitas terhadap bidang pekerjaan kelitbangan.

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2023

No.	Arah kebijakan	Strategi
1.	Penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dengan jaminan mutu hasil kelitbangan	a. Menggunakan hasil-hasil pemetaan masalah pada dokumen-dokumen perencanaan atau kajian eksisting sebagai basis utama dalam merencanakan kegiatan-kegiatan kelitbangan; b. Menghimpun dan memetakan beragam masalah, isu strategis serta kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas sembari tetap memperhatikan keterkaitannya dengan isu-isu global terkini; c. Merumuskan tema prioritas serta target output di setiap bidang fokus kelitbangan. Penentuan bidang adalah berdasarkan pada apa yang telah diatur dalam Permendagri 17/2016 yaitu bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, bidang sosial dan kemasyarakatan, bidang ekonomi dan pembangunan daerah, dan bidang inovasi dan pengembangan iptek. rencana kelitbangan untuk 3 (tiga) tahun kedepan

No.	Arah kebijakan	Strategi
		merupakan kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan; d. Melaksanakan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah; e. Menetapkan indikator keluaran baku sesuai standar pelaporan kelitbangan bagi seluruh pelaku kelitbangan; f. Mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan partisipasi publik untuk dapat turut memvalidasi/menguji hasil-hasil kelitbangan, misalnya melalui skema seminar hasil penelitian; g. Mengembangkan fasilitas kelitbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan mendorong serta memfasilitasi penempatan fasilitas kelitbangan pemerintah pusat di daerah; h. Melakukan sertifikasi unit-unit pengujian yang terkait dengan kelitbangan dan kompetensi pelaksana pada unit tersebut.
2.	Meningkatkan jejaring (<i>networks</i>) dan kolaborasi dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta	a. Sosialisasi rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kabupaten Banyumas kepada berbagai level dan lingkup <i>stakeholders</i> mulai dari lembaga pemerintah kementerian maupun non kementerian maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga riset/kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi hingga ke komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan melalui berbagai forum serta berbagai media komunikasi baik media elektronik

No.	Arah kebijakan	Strategi
		maupun media cetak dan temu muka dengan para mitra; b. Membangun kesepahaman bersama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kelitbangan daerah dan mewujudkan dalam bentuk konsorsium riset daerah; c. Mengembangkan kemitraan seperti <i>joint research</i>, <i>joint production</i> dan <i>joint development</i> melalui konsorsium riset daerah untuk lingkup nasional maupun internasional; d. Mengembangkan skema insentif bagi para peneliti luar untuk dapat melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Banyumas dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan daerah; e. Memberikan dukungan bagi aktivitas-aktivitas publikasi hasil-hasil kelitbangan di daerah pada forum-forum nasional dan/atau internasional yang relevan.
3.	Mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk perekayasaan maupun evaluasi kebijakan	a. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang; b. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. Memperluas diseminasi hasil-hasil kelitbangan melalui penyelenggaraan <i>event</i> (konferensi, seminar, simposium, <i>workshop</i>) atau penggunaan media, baik populer maupun ilmiah;

No.	Arah kebijakan	Strategi
		d. Meningkatkan penyerapan hasil-hasil kelitbangan yang berorientasi pada hilirisasi industri oleh pelaku industri untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memiliki nilai tambah lebih; e. Meningkatkan penerapan hasil-hasil kelitbangan khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang berkontribusi penting dalam perekonomian; f. Meningkatkan kemudahan pelayanan pendaftaran paten dan hak cipta serta bantuan advokasi hukum bila ada permasalahan terkait dengan paten dan hak cipta tersebut; g. Mengembangkan basis data (<i>database</i>) dan sistem informasi manajemen terkait data dan informasi daerah, hasil-hasil kelitbangan daerah, publikasi ilmiah, paten dan HKI untuk mendukung diseminasi dan evaluasi agenda, prioritas, dan program kelitbangan.
4.	Menumbuhkembangkan iklim dan mendorong inovasi-inovasi dari masyarakat, khususnya dalam bentuk aplikasi dan teknologi tepat guna	a. Merevitalisasi dan memperkuat sistem inovasi daerah (SiDa) sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas dan keinovasian di tingkat daerah, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan rencana induk kelitbangan daerah; b. Membangun budaya inovasi dan kreativitas melalui strategi jangka panjang melalui sistem pendidikan dan pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pelatihan, serta melalui strategi

No.	Arah kebijakan	Strategi
		jangka pendek melalui pengembangan ekosistem <i>technopreneur</i>, inkubator inovasi kelitbangan dan bisnis, ruang-ruang diskusi IPTEK, penciptaan <i>role model</i>, penyediaan beragam bentuk insentif, dan apresiasi; c. Mendorong penyusunan regulasi-regulasi daerah yang mendukung penumbuhkembangan iklim inovasi di masyarakat; d. Mengembangkan skema insentif, misalnya dalam bentuk penghargaan rutin, bagi para inovator-inovator lokal yang karyanya telah/dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat atau sistem royalti sebagai hak atas kekayaan intelektual; e. Menggalang dukungan pemerintah provinsi dan pusat, sektor swasta, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk penciptaan ruang-ruang inovasi berupa <i>techno park</i> dan/atau <i>science park</i> sebagai pusat penerapan teknologi, pusat diseminasi, dan penumbuhan usahawan (<i>entrepreneur</i>); f. Fasilitasi usahawan-usahawan muda melalui dukungan keikutsertaan mereka pada forum-forum <i>startup</i> (usaha-usaha rintisan yang sebagian besar diinisiasi oleh generasi muda) pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Dewasa ini, pertumbuhan <i>startup</i> di Indonesia begitu pesat siring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi; g. Mengikutsertakan materi-materi

No.	Arah kebijakan	Strategi
		kelitbangan dalam kegiatan-kegiatan lain di daerah yang bersifat massal dan kesenangan seperti festival, bazaar, pameran, lomba dan sebagainya guna meningkatkan apresiasi dan ketertarikan kepada kelitbangan daerah; h. Mendorong pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah; i. Mendorong pemanfaatan inovasi masyarakat dan swasta untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.
5.	Meningkatkan kinerja lembaga kelitbangan daerah dengan mendorong penguatan aspek SDM dan pembiayaan	a. Melakukan pemetaan keahlian yang diperlukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga peneliti di masa yang akan datang; b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan yang produktif, berkompeten dan handal melalui pendidikan, pelatihan, studi komparasi, magang, dan keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (seminar, konferensi); c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti; d. Meningkatkan kapasitas lembaga kelitbangan daerah melalui pemenuhan sarana dan prasarana bidang kelitbangan, penyusunan rencana kerja kelitbangan yang mantap dan tepat waktu, serta penumbuhan budaya kerja yang kondusif; e. Meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan sehingga hasil-hasil kelitbangan dapat komplementer satu

No.	Arah kebijakan	Strategi
		sama lain;
		f. Melakukan sertifikasi kompetensi dan/atau memfasilitasi keanggotaan asosiasi profesi bagi para pelaku kelitbangan daerah;
		g. Meningkatkan kesejahteraan pelaku kelitbangan daerah sehingga meningkatkan apresiasi dan loyalitas terhadap bidang pekerjaan kelitbangan.

3.3 Indikasi Program Prioritas Kelitbangan

Penentuan program prioritas kelitbangan daerah disusun dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan sebagai dasar pengelompokkan program-program prioritas kelitbangan sesuai Permendagri No.17 Tahun 2016, yaitu bidang 1) tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; 2) sosial dan kemasyarakatan; 3) ekonomi dan pembangunan daerah; 4) inovasi dan pengembangan IPTEK.

Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 menunjukan masih terdapat permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yaitu: Kualitas sumber daya manusia, Ketersediaan infrastruktur, Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Kemiskinan dan Pengangguran, Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 maka dapat dirumuskan isu-isu kelitbangan di Kabupaten Banyumas. Isu strategis kelitbangan yang harus ditangani dalam 3 (tiga) tahun ke depan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia untuk peningkatan sumber daya manusia telah menjadi kesadaran bersama karena dengan persaingan yang semakin terbuka hanya sumber daya manusia yang kualitas yang bisa bersaing.

Peluang bonus demografi hanya bisa diraih dengan peningkatan sumber daya manusia, banyaknya penduduk usia produktif yang berkualitas akan mampu bersaing dan mandiri, serta mampu bekerja dan menabung untuk

meningkatkan investasi. Sebaliknya meningkatnya usia produktif namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan menjadi beban dan melahirkan lingkaran kemiskinan berikutnya.

Kualitas sumber daya manusia akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat utama untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan dan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat Banyumas.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Merata Antar Wilayah

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong pengembangan wilayah dengan meningkatkan produktivitas wilayah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat, membuka peluang bagi pengembangan potensi wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto–Kroya, reaktivasi jalur kereta api antara Purwokerto Wonosobo; dan rencana pembangunan Jalan Tol Pejagan–Pemalang, serta rencana pengembangan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga akan mempermudah akses ke wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini akan membuka peluang bagi pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang tersebut hanya bisa diraih jika pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas terhubung dengan proyek strategis tersebut.

Kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan. Namun demikian kinerjanya perlu dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan air untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi padi sebagai sumber pangan utama. Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang menentukan kedaulatan negara dan bangsa.

Penyediaan infrastruktur dasar air minum, sanitasi, dan perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk di wilayahnya. Cakupan pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Banyumas belum menjangkau seluruh penduduk. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna memberikan akses menyeluruh air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni bagi penduduk Kabupaten Banyumas. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi

semakin penting karena merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal

Kabupaten Banyumas memiliki berbagai potensi daerah yang dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa sumber daya alam, penduduk sebagai sumber tenaga kerja, sumber daya buatan yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun sumber daya sosial yang berupa kelembagaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pengembangan seluruh potensi atau sumber daya tersebut dapat menciptakan berbagai peluang usaha untuk dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat, dan diharapkan akan menimbulkan dampak ikutan (*multiplier effect*) yang luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mampu mengidentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkannya secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah akan menyebabkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan daerah karena keterbatasan pendapatan daerah, lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya.

4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Pengentasan Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran

Kemiskinan merupakan akar berbagai permasalahan pembangunan. tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan

ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

Menggunakan sarana prasarana yang ada untuk menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial serta memenuhi hak penyandang disabilitas yang miskin. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang miskin dan PMKS untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menurunkan pengangguran. Meningkatkan kewirausahaan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia produktif. Menggiatkan kepariwisataan dengan penggerak penduduk usia produktif.

5. Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu utama dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun dimensi pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait lingkungan, sebagaimana 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan dan hukum dan tata kelola. Hal ini menggambarkan bahwa keberlanjutan pembangunan bahkan keberlanjutan hidup manusia bergantung pada keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 daya dukung lingkungan di Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang menuju baik meliputi daya dukung pangan, daya dukung fungsi lindung dan daya dukung lahan terbangun dengan beberapa pengecualian di Kecamatan Purwokerto Timur. Daya dukung air di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dengan perkembangan penduduk dan pengembangan wilayah telah mengakibatkan penurunan daya dukung air, sehingga tanpa upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan Kabupaten Banyumas diproyeksikan mengalami defisit air pada tahun 2030.

Sementara itu kinerja layanan atau jasa ekosistem di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa mayoritas luasan jasa ekosistem penyedia bahan pangan, jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, dan jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana berada pada kelas rendah. Perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan meningkatkan timbunan sampah dan emisi GRK yang mencemari lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Proses produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga harus diupayakan agar meminimalkan emisi GRK dan limbah, bahkan jika

memungkinkan dilakukan sistem produksi terpadu tanpa limbah (*Zero waste*). Sementara pengelolaan sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia diupayakan terus dikurangi mulai dari sumbernya.

6. Pengelolaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di suatu daerah. Tanpa tata kelola yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping komitmen, kualitas sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi khususnya teknologi informasi serta mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) juga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun demikian infrastruktur pendukung penerapan *e-government* tersebut sampai saat ini belum optimal.

Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal dengan penggunaan anggaran yang makin efektif dan efisien pembangunan dan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Aparatur pemerintahan yang profesional dan mandiri untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. Konsistensi pelaksanaan prinsip-prinsip merit system untuk mendukung aparatur pemerintahan yang profesional dan mandiri dengan mengoptimalkan SDM yang ada. Peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung implementasi pemerintahan yang bersih dan berbasis digital yang lebih efisien dan efektif. Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya dan menciptakan suatu sistem untuk mengontrol kinerja ASN secara online serta mengadakan evaluasi dalam periode tertentu terkait dengan sistem yang dibuat. Dalam rangka

menindaklanjuti isu pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas maka perlu adanya kesiapan ekonomi pada daerah otonom pemekaran wilayah.

Rekomendasi Majelis Pertimbangan Kelitbangan untuk menarik minat ASN terhadap jabatan fungsional peneliti. Evaluasi dan monitoring bagi ASN untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan publik yang sudah berjalan. Melakukan kordinasi secara berkelanjutan dan menjalin hubungan yang harmonis baik itu horizontal maupun vertikal. Penguatan kelembagaan APIP dan pengembangan kebijakan independensi dan obyektifitas.

3.3.1 Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka menindaklanjuti isu strategis Kabupaten Banyumas, dapat dirumuskan program prioritas dengan pertimbangan beberapa tema kelitbangan terkait dengan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam mendukung pemantapan melalui:

1. Peningkatan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Peningkatan aparatur dan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan indeks reformasi birokrasi dengan Meningkatkan Kualitas perencanaan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Optimalisasi tingkat efektivitas kinerja melalui penataan ASN sesuai dengan kompetensinya dan menciptakan suatu sistem untuk mengontrol kinerja ASN secara online serta mengadakan evaluasi dalam periode tertentu terkait dengan sistem yang dibuat. Disamping itu juga perlu untuk meningkatkan indeks perilaku anti korupsi (IPAK) dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik dengan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah. Dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan dalam perijinan serta penguatan kelembagaan APIP dan pengembangan kebijakan indenpendensi dan obyektifitas.

2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan meningkatkan indeks kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD dari pajak daerah dan retribusi sehingga perlu adanya analisis potensi yang akan meningkatkan PAD.

3. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemerintah salah satunya dengan meningkatkan indeks SPBE dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan implementasi E-Government dan meningkatkan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik. Isu pemekaran wilayah

Kabupaten Banyumas perlu dilakukan adanya kesiapan ekonomi di daerah otonom pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.

Tabel 3. 6 Program prioritas kelitbangan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
1.	Peningkatan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1. Evaluasi Kinerja ASN Kabupaten Banyumas 2. Kajian Akademik perubahan RPJMD 3. Pengembangan Instrumen Analisis Rencana dan Penganggaran Pencapaian SPM	1. Rekomendasi evaluasi kebijakan kinerja ASN 2. Naskah Akademik Perubahan RPJMD 3. Rekomendasi perencanaan pencapaian target SPM	2021-2023	Bappedalit bang, Bagian Organisasi Setda, BKAD, BKPSDM, Bappenda
2.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Analisis Potensi PAD Kabupaten Banyumas 2. Analisis Kelas Tanah Dan NJOP Kabupaten Banyumas	1. Rekomendasi Potensi PAD dari pajak dan retribusi daerah 2. -Pemetaan zona nilai tanah sesuai dengan bidang/kelas -Cluster harga tanah dan NJOP	2021-2023	Bappedalit bang dan SKPD yang menangani pendapatan

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
		3. Kajian Pendirian BPR Kabupaten Banyumas (FS)	3. Rekomendasi kelayakan Pendirian BPR Kabupaten Banyumas		
3.	Peningkatan pengelolaan pemerintahan	1. Evaluasi Sistem Tata Kelola SPBE 2. Penyusunan Model Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi 3. Penyusunan model evaluasi standar pelayanan publik terpadu 4. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyumas 5. Kajian Evaluasi Pengembangan Smart City Di	1. Hasil evaluasi Sistem Tata Kelola SPBE 2. Model Inovasi Proses bisnis terintegrasi 3. Model evaluasi standar pelayanan publik terpadu 4. Rekomendasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 5. Hasil Evaluasi pengembangan Smart	2021-2023	Bappedalit bang, Setda dan SKPD Terkait Pelayanan Publik

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
		Kabupaten Banyumas	City di Kabupaten Banyumas		
		6. Potensi ekonomi daerah otonom baru pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas	6. Rekomendasi peta potensi ekonomi daerah otonom baru		

3.3.2 Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam rangka menindaklanjuti isu strategis Kabupaten Banyumas, dapat dirumuskan dapat dirumuskan program prioritas dengan pertimbangan beberapa tema kelitbangan terkait dengan bidang Sosial dan Kemasyarakatan dalam mendukung pemantapan melalui:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan Kesehatan dalam peningkatan gizi dan Kesehatan masyarakat. Disamping itu juga perlu mengoptimalkan pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi serta RAD Stunting dalam menurunkan angka stunting, kematian ibu dan Balita.

2. Peningkatan akses pendidikan yang merata

Peningkatan akses Pendidikan yang merata dengan mengoptimalkan program wajib belajar 9 tahun dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah maka perlu meningkatkan pengelolaan Pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah. Disamping itu perlu adanya kemudahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas yang miskin dan rentan.

3. Pelestarian dan pengembangan budaya Banyumas

Pelestarian dan pengembangan budaya Banyumas dengan mengoptimalkan regulasi pemerintah dan peran kelembagaan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah dalam meningkatkan Kepariwisata dan Kebudayaan Banyumas dalam Persaingan Bisnis Ekonomi Kreatif. Dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah perlu adanya strategi pelestarian dan pengembangan budaya local, inventarisasi cagar budaya benda yang nantinya akan ditetapkan, dihapus atau ditingkatkan sebagai cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang menjadi warisan local Banyumas.

4. Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata

Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata dengan mengoptimalkan regulasi pemerintah dan peran kelembagaan untuk pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Kepariwisata Banyumas dalam Persaingan Bisnis Ekonomi Kreatif. Dalam rangka pengembangan pariwisata perlu mengembangkan pengelolaan daya Tarik wisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata dan meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif serta mengembangkan kebudayaan lokal.

5. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan hilirisasi kewirausahaan dan mendorong kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat serta kebijakan pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan implementasi Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (RAD (PUG) dalam peningkatan indeks pemberdayaan gender. Meningkatkan kebijakan responsive gender yang mendukung pemberdayaan perempuan. Meningkatkan peran kelembagaan dalam kerjasama menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7. Peningkatan pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Peningkatan pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan meningkatkan peran Lembaga dalam menurunkan jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pembuatan system dan kelembagaan untuk menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social serta memenuhi hak penyandang disabilitas yang miskin melalui system yang transparan dan akuntabel

8. Peningkatan upaya penanggulangan bencana

Peningkatan upaya penanggulangan bencana dengan menurunkan indeks risiko bencana dengan meningkatkan mitigasi bencana dan mengembangkan system pengurangan resiko bencana yang adaptif

Tabel 3. 7 Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
1.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Analisis Model Pelayanan Kesehatan Pasca Pandemi 2. Strategi peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat 3. Penyusunan model penanganan penyakit thalasemia dan diabetes mellitus	1. Model pelayanan Kesehatan terintegrasi 2. Rekomendasi kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan fasilitas Kesehatan 3. Rekomendasi model penanganan penyakit thalassemia dan diabetes mellitus	2021-2023	Dinkes, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang
2.	Peningkatan akses pendidikan yang merata	1. Strategi Perluasan akses dan kualitas pendidikan 2. Strategi pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	1. Rekomendasi Peningkatan kualitas dan kuantitas sekolah 2. Rekomendasi kebijakan pengelolaan pendidikan	2021-2023	Dinas Pendidikan

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
		dan menengah pertama			
3.	Pelestarian dan pengembangan budaya Banyumas	1. Strategi pelestarian dan pengembangan budaya Banyumas 2. Kajian Akademik Cagar Budaya tak benda 3. Kajian Akademik Cagar Budaya benda 4. Kajian Model Pengenalan Budaya Dalam Perspektif Anak Muda (Milenial)	1. Kebijakan Pelestarian dan pengembangan budaya Banyumas 2. Katalog, potensi produk budaya, potensi Kekayaan intelektual Komunal 3. Rekomendasi penetapan, penghapusan dan peningkatan cagar budaya 4. Model Pengenalan budaya	2021-2023	Dinporabudpar dan Dinarpusda
4.	Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	1. Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata 2. Pengembangan kawasan	1. Rekomendasi penetapan daya Tarik wisata 2. Rekomendasi penetapan kawasan	2021-2023	Dinporabudpar, Dinsosperma des, DPU, DLH, DPMPTSP, Dinperten KP

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
		strategis pariwisata	strategis pariwisata		dan Dinkannak
		3. Masterplan Kota Lama Banyumas	3. Dokumen Masterplan Kota Lama Banyumas		
		4. Analisis Efektifitas Kelompok Sadar Wisata Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Banyumas	4. Rekomendasi strategi efektifitas kelompok sadar wisata		
		5. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	5. Neraca satelit Pariwisata Daerah		
		6. Penyusunan Kajian Feasibility Study (FS) & Peluang Investasi Kabupaten Banyumas Bidang Pariwisata pada Era New Normal	6. Rekomendasi kelayakan dan dokumen FS		

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
5.	Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1. Sistem Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Evaluasi Program Pelatihan Ketenagakerjaan	1. Rekomendasi kebijakan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 2. Rekomendasi kebijakan pengukuran kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Rekomendasi hasil pengukuran efektivitas program pelatihan ketenagakerjaan	2021-2023	Dinnaker Kop & UKM
6.	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Penguatan pemberdayaan perempuan	1. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan PUG 2. Rekomendasi kebijakan responsive gender yang mendukung pemberdayaan perempuan	2021-2023	DPPKBP3A

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
7.	Peningkatan pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Penyusunan model akses Pelayanan PMKS	Model pelayanan PMKS yang terpadu	2021-2023	Dinsosperma des, Dinperkim, Dindik, Dinkes dan Dinas PU
8.	Peningkatan upaya penanggulangan bencana	1. Kajian Risiko Bencana 2. Penyusunan model pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 4. Kajian Peta Kebencanaan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten Banyumas	1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) 2. Model Penanggulan gan Bencana 3. Regulasi Penanggulan gan Bencana 4. Peta kebencanaan dan mitigasi bencana	2021-2023	BPBD, Setda, Satpol PP

3.3.3 Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Berkaitan dengan arah kebijakan kelitbangan, maka dalam rangka menindaklanjuti isu strategis Kabupaten Banyumas, dapat dirumuskan program

prioritas dengan pertimbangan beberapa tema kelitbangan terkait dengan bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah dalam mendukung pemantapan melalui:

1. Peningkatan daya saing produk unggulan

Peningkatan daya saing produk unggulan dengan peningkatan struktur perekonomian yang didukung oleh terwujudnya produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, kreatif, inovatif, mempunyai keunggulan komparatif serta kuat berkompetisi di pasar global. Peningkatan pembangunan pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.

2. Peningkatan kapasitas pertanian, UMKM dan industri kreatif

Peningkatan kapasitas pertanian, UMKM dan Industri kreatif dengan mengoptimalkan akses permodalan, insentif pemerintah, sarana dan prasarana untuk mengembangkan UMKM. Pengembangan produk-produk UMKM yang berbasis zero waste dengan meningkatkan kesadaran UMKM untuk melakukan pengelolaan limbah. Memperbaiki tata kelola pasar daerah, pasar tradisional dan PKL serta memaksimalkan potensi pendapatannya. Mengembangkan produk UMKM yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis dalam menghadapi kesepakatan global (SDGs, MEA, AFTA)

3. Peningkatan iklim investasi

Peningkatan iklim investasi dengan mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana dan infrastruktur untuk meningkatkan peran investor local dan perlu menyusun Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Banyumas untuk memudahkan investor dalam mencari peluang investasi di Kabupaten Banyumas.

4. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah

Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah serta pemerataan dan kesediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang merata bisa dilihat dari indeks daya saing daerah yang selalu meningkat.

5. Peningkatan indeks ketahanan pangan

Peningkatan indeks ketahanan pangan dengan meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Oleh karena itu perlu membuat model pendugaan stok gabah/beras di tingkat petani produsen dan Menyusun indeks ketahanan pangan sampai tingkat kecamatan serta peta

ketahanan dan kerentanan pangan sehingga bisa diketahui wilayah mana saja yang masih rawan pangan. Disamping itu perlu juga disusun kesiapsiagaan pangan untuk mengetahui status kedaruratan krisis pangan di Kabupaten Banyumas sampai tingkat Desa/Kelurahan.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya air serta sanitasi

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya air dan sanitasi dilakukan melalui penyusunan model pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, menyusun pola dan perencanaan pengelolaan sumber daya air dan Pemetaan Sumber Mata Air dan Pengelolaannya.

7. Pengelolaan Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dan Pemetaan Produksi dan Pengelolaan Sampah serta Penyusunan model Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Tabel 3. 8 Program prioritas kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
1.	Peningkatan daya saing produk unggulan	1. Analisis Potensi Sosial Ekonomi Dan Budaya Berbasis Kecamatan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Rekomendasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah dari aspek manajemen, teknologi produksi, regulasi dan pasar	2021-2023	Dinnaker Kop & UKM, Dinperindag, Dinperstan KP, Dinkannak dan Dinporabud-par
		2. Pengaruh Penggunaan Magot pada Usaha Budidaya Ikan Pada Berbagai Jenis	2. - Formulasi Pakan Berbahan Magot -FS Pengembangan Ikan Berbasis		

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
		Ikan, dan Model Pemeliharaan 3. Kajian Kualitas Pupuk Berbahan Darah Limbah RPH 4. Analisis pengembangan bisnis industry kreatif 5. Pengembangan Sistem pertanian yang terintegrasi	Formula Berbahan Magot 3. -Formula Pupuk berbahan darah limbah RPH -Formula Penggunaan Pupuk pada pajale 4. Rekomendasi kebijakan pengembangan bisnis industry kreatif 5. Rekomendasi kebijakan Sistem Integrasi Pertanian berkelanjutan		
2.	Peningkatan kapasitas pertanian, UMKM dan industri kreatif	1. Kajian Shelter PKL 2. Kajian FS Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Banyumas 3. Penyusunan Model Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Korporasi	1. Model pengelolaan dan penataan PKL 2. Rekomendasi Kelayakan pendirian SRG 3. Model kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi	2021-2023	Dinnaker Kop & UKM, Dinperindag, Dinpertan KP, dan Dinkannak

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
		4. Penyusunan naskah akademik perda pengelolaan pasar rakyat dan toko modern	4. - Naskah akademik perda pengelolaan pasar rakyat dan toko modern - Rekomendasi dasar penyusunan perda		
		5. Kajian FS Perusda Pasar	5. Rekomendasi kelayakan perusda pasar		
		6. Penyusunan Recovery Plan Pemulihan Ekonomi Banyumas 2021-2022	6. Rekomendasi kebijakan Recovery Plan Pemulihan Ekonomi Banyumas 2021-2022		
3.	Peningkatan iklim investasi	1. Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Banyumas	1. Dokumen peta potensi dan peluang investasi	2021-2023	DPMPTSP, Dinperindag, Dinnaker kop UKM, Dinpertan KP, Dinkannak dan DPU
4.	Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah	1. Penyusunan Indeks daya saing infrastruktur 2. Analisis Kebutuhan	1. Nilai Indeks daya saing daerah 2. Dokumen Hasil Analisis	2021-2023	DPU, Dinperkim, Dikominfo, Dinpertan KP, DLH, dan Dinhub

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
		pengembangan Jaringan LLAJ 3. Menyusun Standart Koefisien Luasan Parkir pada Bangunan 4. Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Central Business District (CBD) Purwokerto 5. Kajian Ketercukupan ketersediaan pompa air tanah dalam dan dangkal untuk memenuhi kebutuhan air tadah hujan	kebutuhan jaringan LLAJ 3. Rekomendasi standard koefisien luasan parkir pada bangunan 4. Rekomendasi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas di Kawasan CBD 5. Ketercukupan Ketersediaan Pompa Air Tanah Dalam dan Dangkal untuk Memenuhi Kebutuhan Air Tadahan Hujan		
5.	Peningkatan Indeks ketahanan pangan	1. Stok Pangan Utama dan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	1. -model pendugaan stok gabah/beras di tingkat petani produsen -Indeks Ketahanan pangan kecamatan	2021-2023	Dinptan KP, Dinkannak dan Dinperindag

No	Tema Kelitbangan	Program/ Kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
		2. Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	2. Rekomendasi kebijakan Kesiapsiagaan Krisis Pangan		
6.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya air serta sanitasi	1. Penyusunan model pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic 2. Menyusun Model pengelolaan sumber daya air 3. Pemetaan Sumber Mata Air dan Pengelolaan	1. Rekomendasi model pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic 2. Model pengelolaan sumber daya air 3. Peta sumber mata air dan model pengelolaannya	2021-2023	DLH, Dinkes dan Dinperkim
7.	Pengelolaan Lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan 2. Pemetaan Produksi dan Pengelolaan Sampah 3. Penyusunan model Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Rekomendasi system dan pengelolaan persampahan 2. Dokumen Peta Produksi Sampah 3. -Model Pengelolaan Sampah -Rekomendasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati	2021-2023	DLH dan Dinperindag

3.3.4 Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Dalam rangka menindaklanjuti isu strategis Kabupaten Banyumas, dapat dirumuskan program prioritas dengan pertimbangan beberapa tema kelitbangan terkait dengan bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek dalam mendukung pematapan melalui:

1. Optimalisasi potensi sumber daya manusia Kelitbangan

Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif dalam mendukung kegiatan kelitbangan di Kabupaten Banyumas. Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan dan Tim pengendali mutu kelitbangan dengan melibatkan PT sebagai anggota tim pengendali mutu serta pembentukan Tim Saberina (Satuan Bersama Pengembangan Kreativitas dan Inovasi) yang terdiri dari komunitas kreatif di Kabupaten Banyumas serta stake holder lain yang dalam ha pengembangan hasil hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK

Meningkatkan jumlah penelitian dan kajian dalam bidang inovasi dan pengembangan IPTEK serta perbaikan kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan OPD, organisasi, dan instansi yang terkait. Fasilitasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik, Penumbuhkembangan budaya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan fasilitasi dan bentuk pengharagaan bagi para inovator di masyarakat. Memperkuat sistem Inovasi Daerah (SIDa).

3. Peningkatan kerjasama kelitbangan

Meningkatkan kerjasama kelitbangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten lainnya dan meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan akademisi yang berkompeten dalam kegiatan kelitbangan di Kabupaten Banyumas. Kerjasama kelitbangan dengan Lembaga lain untuk meningkatkan inovasi dan pembangunan serta diseminasi hasil hasil kelitbangan di Kabupaten Banyumas sehingga meningkatkan indeks daya saing daerah dan indeks inovasi daerah. Bekerjasama dengan institusi lain untuk melakukan publikasi kegiatan dan hasil-hasil kelitbangan Kabupaten Banyumas di media cetak dan OJS (*open journal system*)

4. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Meningkatkan upaya perlindungan atas kekayaan inetelktual masyarakat Kabupaten Banyumas baik yang bersifat pribadi ataupun komunal dengan memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Tabel 3. 9 Program prioritas kelitbangan bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

No	Tema Kelitbangan	Program/ kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
1.	Optimalisasi potensi sumber daya manusia Kelitbangan	1. <i>Up grading</i> SDM kelitbangan di Kabupaten Banyumas 2. Sertifikasi kompetensi tenaga/SDM Kelitbangan	1. SDM kelitbangan yang produktif dan berkualitas 2. Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali mutu, dan Tim Saberina yang secara efektif dan efisien membantu pengembangan kelitbangan	2021-2023	Bappedalitbang, BKPSDM, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat
2.	Peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	1. Penelitian/pengkajian strategis dan kajian aktual 2. Penelitian Kompetitif Kelitbangan Banyumas 3. Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova)	1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Kelitbangan 2. Rekomendasi kebijakan hasil kajian 3. Rekomendasi pengembangan hasil kreativitas dan Inovasi	2021-2023	Semua SKPD, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat

No	Tema Kelitbangan	Program/ kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
		4. Fasilitasi Inovasi Pelayanan publik	4. Fasilitasi Indeks Inovasi daerah / Innovative Govenrment Award (IGA		
		5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	5. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)		
		6. Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi dan distribusi UMKM	6. Pemanfaatan hasil hasil kelitbangan pada UMKM		
3.	Peningkatan kerja sama kelitbangan	1. Program kolaborasi kelitbangan dengan pemprov dan pemkab lainnya	1. Adanya Kolaborasi dengan pemprov dan pemkab lainnya	2021-2023	Bappedalitbang dan Lembaga Kelitbangan
		2. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka	2. Adanya program kolaborasi kelitbangan dengan pihak PTN dan akademisi yang berkompeten		
		3. Inisiasi <i>Joint research</i>	3. Adanya MoU dan SPK		

No	Tema Kelitbangan	Program/ kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
		4. Sosialisasi dan Diseminasi hasil kelitbangan 5. Pengembangan basis data sistem informasi manajemen daerah terkait hasil hasil kelitbangan daerah, publikasi ilmiah, paten, dan HKI untuk mendukung desimenasi.	dengan pihak lembaga kelitbangan 4. Adanya bentuk Kerjasama dengan lembaga litbang dalam Sosialisasi dan Desimenasi hasil kelitbangan kepada masyarakat 5. Adanya sistem informasi terkait basis data kelitbangan		
4.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1. Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat	1. Fasilitasi Hak Intelektual Komunal	2021-2023	Bappedalitbang, Lembaga Kelitbangan, dan

No	Tema Kelitbangan	Program/ kegiatan Prioritas	Keluaran	Tahun Pelaksanaan	SKPD Terkait
			2. Fasilitasi Hak Intelektual Personal		Kemenkum- ham

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

Setelah diuraikan mengenai strategi kelitbangan daerah sebagaimana terdapat pada Bab sebelumnya, berikut ini diuraikan mengenai strategi pelaksanaannya yang mencakup dua bagian pokok yaitu i) kelembagaan, dan ii) evaluasi pelaksanaan. Masing-masing bagian ini diuraikan sebagai berikut.

4.1. Kelembagaan

Kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri atas empat komponen yaitu 1) Majelis Pertimbangan (MP), 2) Tim Pengendali Mutu (TPM), 3) Sekretariat TPM, dan 4) Tim Kelitbangan (TK). TK sendiri terdiri atas dua unsur yaitu unsur pelaksana dan unsur penunjang.

MP yang diketuai oleh Bupati bertugas untuk : 1) memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan, 2) memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan, dan 3) memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana kerja kelitbangan, baik dalam bentuk Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan.

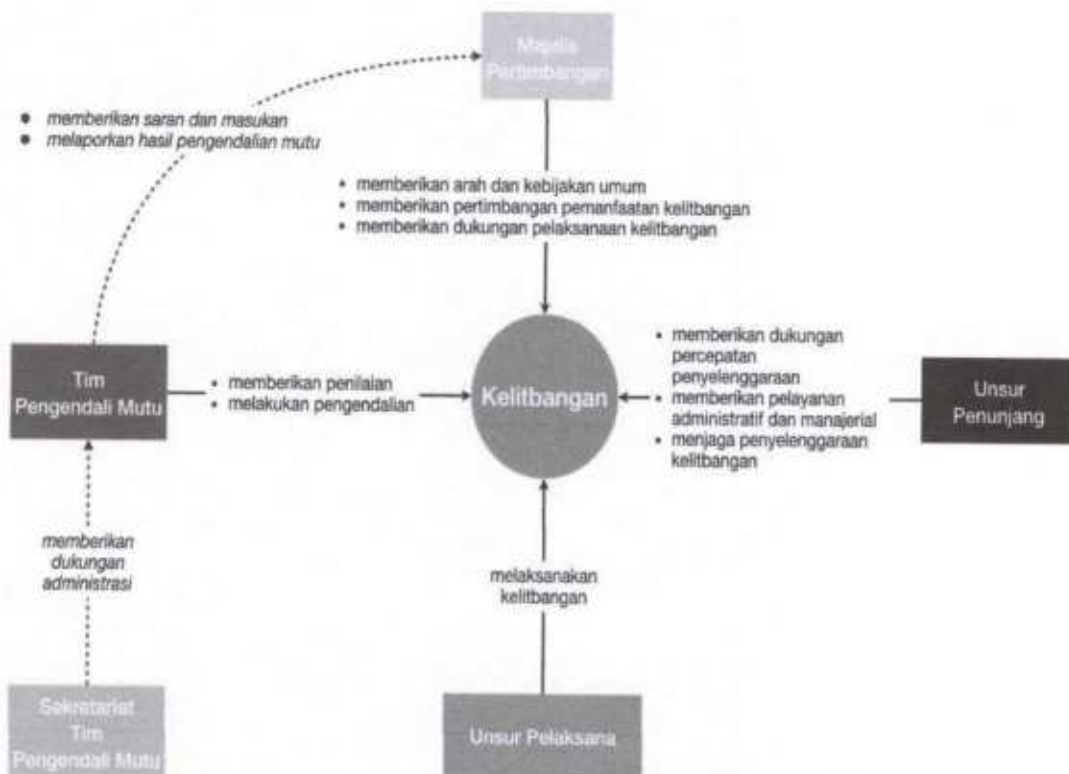
TPM yang diketuai oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas, memiliki tugas untuk : 1) memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan, 2) melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan, 3) memberikan saran dan masukan kepada MP guna penyempurnaan kelitbangan, dan 4) melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada MP. Dalam melaksanakan tugasnya, TPM didukung oleh Sekretariat TPM yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja TPM.

Unsur pelaksana dalam TK diketuai oleh Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang ditugaskan, memiliki tugas untuk : 1) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, dan 2) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Unsur penunjang dalam TK dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berasal dari pejabat administrator terkait. Tugas dari unsur penunjang ini adalah : 1) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan, 2) memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan, 3) memberikan peluang kemudahan,

bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang, 4) memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah, 5) menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan, dan 6) melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Kelembagaan kelitbangan ini diilustrasikan pada Gambar 4.1 sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Kelembagaan kelitbangan Kabupaten Banyumas

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Keseluruhan komponen kelitbangan Majelis Pertimbangan (MP), Tim Pengendali Mutu (TPM), Sekretariat TPM, dan Tim Kelitbangan (TK)) melaksanakan koordinasi (atau sidang) sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Sidang tersebut juga perlu mengikutsertakan para pemangku kepentingan lainnya.

Sidang tersebut dilaksanakan sebagai media bagi MP untuk memberikan arah dan kebijakan umum kepada segenap komponen kelitbangan. Sidang diagendakan untuk dilaksanakan pada rentang Januari-Februari setiap tahunnya sehingga hasilnya dapat dijadikan input bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Kelitbangan yang harus tersusun paling lambat bulan Februari.

Selain sidang tahunan tersebut, terdapat bentuk koordinasi lain yang diselenggarakan oleh TPM guna memberikan penilaian dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kelitbangan. Penilaian dan pengendalian itu dilaksanakan sekurangnya-kurangnya dua kali dalam setahun yaitu pada tengah dan akhir tahun. Berbeda dengan sidang tahunan, penilaian dan pengendalian ini cukup melibatkan Sekretariat TPM dan Tim Kelitbangan saja dengan dipimpin oleh Kepala Bappedalitbang selaku Penanggungjawab TPM.

Forum kelitbangan merupakan suatu media pertemuan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada triwulan 1 dilaksanakan untuk mensosialisasikan rencana kegiatan di tahun berjalan, evaluasi kelitbangan satu tahun sebelumnya dan pengusulan kelitbangan untuk tahun depan. Forum kelitbangan pada triwulan 2 dilaksanakan untuk *peningkatan kapasitas* dan *sharing knowledge* dengan narasumber untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan di lingkup pemerintah Kabupaten Banyumas.

Rapat perencanaan kelitbangan dilaksanakan oleh internal kelitbangan dengan Kepala Bappedalitbang untuk membahas usulan kajian dari pemangku kepentingan yang masuk ke dalam rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya. Pada rapat ini, dilakukan beberapa proses seleksi, pertama pemilahan kategori kelitbangan atau bukan, pemilahan usulan kelitbangan yang bersifat urgent atau mendesak, serta multisektoral. Selanjutnya diadakan asistensi untuk setiap judul usulan untuk merinci komponen kebutuhan pekerjaan.

Rapat pengawasan dan evaluasi kelitbangan dilaksanakan oleh internal kelitbangan dengan Kepala Bappedalitbang pada triwulan 1, untuk membahas kelitbangan satu tahun sebelumnya mulai dari tahapan kegiatan kelitbangan, substansi, tindak lanjut dan kerjasama dengan tenaga ahli. Koordinasi tim kelitbangan dilakukan tentative sesuai kebutuhan dengan melibatkan tim kelitbangan dapat melaksanakan koordinasi baik sendiri-sendiri (internal pada masing-masing unsur) atau bersama-sama (antar unsur) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk masing-masing unsur tersebut.

Sementara itu, Diseminasi Kelitbangan merupakan acara rutin kelitbangan yang dilaksanakan pada akhir tahun, bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kelitbangan di tahun berjalan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga penelitian pusat, provinsi, pemerintah daerah lain dan non pemerintah serta masyarakat.

Merangkum kesemua uraian di atas, maka jenis-jenis koordinasi pelaksanaan kelitbangan ditampilkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Jenis-Jenis Koordinasi Kelitbangan

No	Jenis-jenis Koordinasi	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Pihak yang Terlibat
1.	Sidang tahunan	Setahun sekali, dilaksanakan pada rentang Januari-Februari	Majelis Pertimbangan	1. Majelis Pertimbangan 2. Tim Pengendali Mutu (TPM) 3. Sekretariat TPM 4. Unsur pelaksana pada Tim Kelitbangan 5. Unsur penunjang pada Tim Kelitbangan 6. Para pemangku kepentingan lainnya
2.	Penilaian dan pengendalian	Setahun dua kali, dilaksanakan pada tengah tahun dan akhir tahun	Tim Pengendali Mutu (TPM)	1. Tim Pengendali Mutu (TPM) 2. Sekretariat TPM 3. Unsur pelaksana pada Tim Kelitbangan 4. Unsur penunjang pada Tim Kelitbangan

3.	Forum Kelitbangan	Tri Wulan 1 dan 2 (Sosialisasi dan peningkatan kapasitas/sharing knowledge)	Unsur Pelaksana dan/atau Unsur Penunjang	1. Unsur pelaksana pada Tim Kelitbangan 2. Unsur penunjang pada Tim Kelitbangan 3. Perangkat Daerah
4.	Rapat Perencanaan Kelitbangan	Tri Wulan 1 (Pembahasan usulan kajian)	Unsur Pelaksana dan/atau Unsur Penunjang	1. Kepala Bappedalitbang 2. Unsur pelaksana pada Tim Kelitbangan 3. Unsur penunjang pada Tim Kelitbangan
5.	Rapat Pengawasan/ Evaluasi	Tri Wulan 1 (Pembahasan kelitbangan satu tahun sebelumnya)	Unsur Pelaksana dan/atau Unsur Penunjang	1. Kepala Bappedalitbang 2. Unsur pelaksana pada Tim Kelitbangan 3. Unsur penunjang pada Tim Kelitbangan
6.	Koordinasi Tim Kelitbangan	Tentatif sesuai kebutuhan	Unsur Pelaksana dan/atau Unsur Penunjang	1. Unsur pelaksana pada Tim Kelitbangan

				2. Unsur penunjang pada Tim Kelitbangan
7.	Diseminasi Kelitbangan	Tri Wulan 4 (Sosialisasi hasil kelitbangan di tahun berjalan)	Unsur Pelaksana dan/atau Unsur Penunjang	Seluruh pemangku kepentingan

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah saatnya melakukan terobosan menggunakan *innovation driven economy*, yakni perekonomian dengan basis pemanfaatan teknologi. Sebagai upaya meninggalkan paradigma lama yakni Iptek dikerjakan hanya untuk kemajuan Iptek, menuju penerapan paradigma baru yakni Iptek harus menjadi landasan untuk pembangunan daerah.

Perkembangan teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat saat ini menjadikan masyarakat banyak melakukan inovasi dan melakukan kegiatan entrepreneurship berbasis inovasi untuk menuju ekonomi yang memiliki daya saing.

Kemudian, salah satu arah kebijakan telah menggariskan bahwa kelitbangan perlu untuk meningkatkan jejaring (*networks*) dan kolaborasi dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta. Dapat diidentifikasi para pemangku kepentingan kelitbangan adalah 1) Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya unsur kelitbangannya, 2) LSM, 3) lembaga riset independen, 4) perusahaan swasta, 5) perguruan tinggi, dan 6) pelaku UMKM.

Memperhatikan perjalanan kelitbangan Kabupaten Banyumas hingga saat ini, dua dari enam kelompok pemangku kepentingan itu, yaitu K/L dan perguruan tinggi, telah/sedang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Diantara K/L yang telah menjalin kerjasama tersebut adalah Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Ristek/BRIN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG), sedangkan perguruan tinggi diantara adalah Universitas Jenderal Soedirman dan Institute Teknologi Telkom Purwokerto.

Ke depan, selain memperkuat kerjasama eksisting dengan dua pihak

tersebut, tentunya perlu diprioritaskan untuk merintis jalinan kerjasama dengan empat pihak lainnya yaitu LSM, lembaga riset independen, perusahaan swasta, dan pelaku UMKM. Dengan ini, maka pelaksanaan kelitbangan dapat menjadi kerja bersama dan meraih hasil yang lebih optimal lagi.

4.1.3. Kerjasama dan Sinergi Pelaksanaan

Bentuk-bentuk kerjasama yang diharapkan dapat dijalin dengan para pemangku kepentingan kelitbangan dengan kelitbangan Kabupaten Banyumas ditampilkan pada **Tabel 4.2** dibawah ini.

Tabel 4. 2 Bentuk-Bentuk Kerjasama Yang Diharapkan Dengan Para Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk Kerjasama yang Diharapkan
1.	Kementerian dan Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah lain	1. Pembangunan ruang-ruang inovasi berupa <i>techno park</i> dan/atau <i>science park</i> 2. Kemudahan pelayanan pendaftaran paten dan hak cipta 3. Pengembangan fasilitas kelitbangan yang dimiliki daerah 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan 5. Kerjasama dan kolaborasi riset 6. Pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti, perekayasa maupun analis kebijakan 7. Pemenuhan sarana publikasi baik akses ke jurnal terakreditasi dan seminar ilmiah
2.	Perguruan Tinggi	1. Kerjasama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan 3. Kolaborasi riset dan kelitbangan 4. Penerjunan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah
3.	Lembaga	1. Kerjasama penelitian, pengkajian,

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk Kerjasama yang Diharapkan
	Kelitbangan Non Pemerintah dan Perusahaan Swasta	pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian 2. Kolaborasi riset dan kelitbangan 3. Pengembangan inkubator bisnis 4. Fasilitasi usahawan muda pada forum-forum <i>startup</i> 5. Penerapan hasil-hasil kelitbangan
4.	Pelaku UMKM	1. Mengembangkan kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menghasilkan invensi-invensi yang mendorong terjadinya perbaikan mutu produk, efisiensi usaha dan terciptanya produk yang berdaya saing 2. Penerapan hasil-hasil kelitbangan
5.	Seluruh Pemangku kepentingan	1. Masukan dalam kegiatan kelitbangan baik rencana induk, rencana kerja dan proses kelitbangan

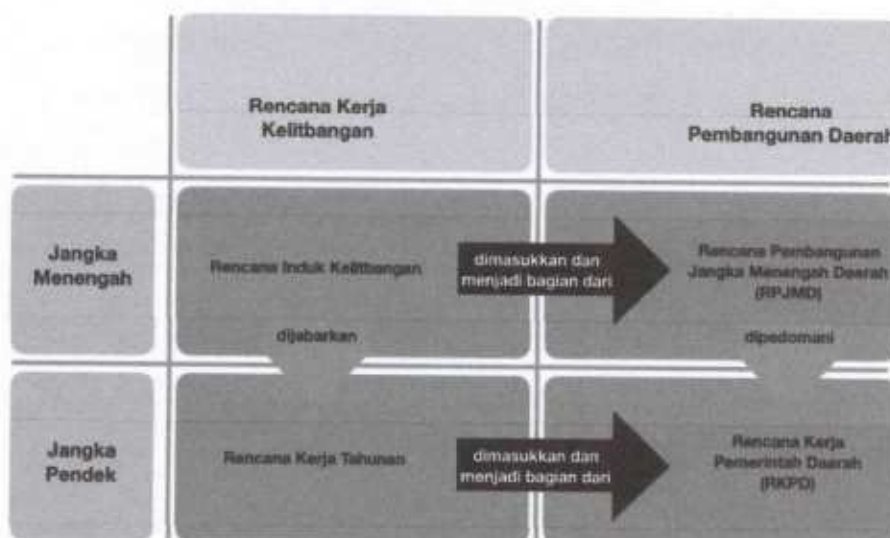
Guna meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaannya, koordinasi tentunya menjadi kunci utama. Oleh karena itu, diharapkan agar pada forum sidang tahunan para pemangku kepentingan dapat terlibat bersama-sama dengan kelembagaan kelitbangan daerah guna menghasilkan arah dan kebijakan umum bagi pelaksanaan kelitbangan tahun berkenaan.

Sinergitas juga dibutuhkan agar hasil-hasil kelitbangan dapat diterapkan oleh pengguna, khususnya sektor industri dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, semenjak tahap awal penelitian hingga perekayasaan, masukan-masukan dari calon pengguna menjadi hal yang penting untuk diakomodasi sehingga penerapan dan pengoperasian nantinya dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan calon pengguna.

Menapaki dunia digital saat ini, perlunya perubahan pola pikir bahwa koordinasi dan sinergi tidak hanya melalui pelaksanaan forum dan rapat-rapat secara tatap muka, namun juga perlu sentuhan teknologi, seperti Kabupaten Banyumas yang selain membentuk grup whatsapp Mitra Kelitbangan sebagai wadah komunikasi, aplikasi SABERINA sebagai wadah komunikasi para inovator, juga perlu membuat website/aplikasi e-kelitbangan dimana didalamnya

termuat menu komunikasi dengan pemangku kepentingan yaitu : 1) Informasi hasil-hasil kajian dan kegiatan kelitbangan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 2) Menu usulan kajian bagi perangkat daerah lingkup Kabupaten Banyumas; 3) Menu usulan inovasi bagi perangkat daerah lingkup Kabupaten Banyumas; 4) Menu usulan inovasi bagi masyarakat; dan 5) Menu Tanya jawab. Strategi ke depan, bahwa koordinasi dan sinergitas lewat media digital ini perlu ditingkatkan.

Terakhir, guna meningkatkan sinergitas dari Rencana Kerja Kelitbangan dengan rencana pembangunan secara keseluruhan, maka dokumen Rencana Kerja Kelitbangan, baik Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan, perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui hal ini maka diharapkan tingkat implementasi dari Rencana Kerja Kelitbangan dapat meningkat karena telah terintegrasi dan menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah.



Gambar 4. 2 Pengintegrasian Rencana Kerja Kelitbangan dengan Rencana Pembangunan Daerah

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Kelitbangan Kabupaten Banyumas dalam 3 (tiga) tahun ke depan harus lebih mengembangkan inovasi daerah dan sistem inovasi daerah, strategi ke arah hasil kelitbangan yang lebih aplikatif, serta penerapan teknologi yang bermanfaat dan tepat guna.

Kelitbangan berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah, hasil kelitbangan juga didukung data dan fakta yang valid, dan memiliki 3 peran krusial dimana peran awal sebagai input penyusunan kebijakan, peran antara sebagai

katalisator pencapaian sasaran dan peran akhir sebagai evaluasi kebijakan/program. Oleh karena itu, kelitbangan perlu menekankan pada tugas pokok dan fungsi dalam melakukan identifikasi permasalahan yang bersifat aktual dan prediktif untuk jangka menengah dan panjang, serta dalam jangka pendek memberikan pertimbangan teknis bagi pimpinan daerah untuk pengambilan langkah dan kebijakan strategis.

Dalam pelaksanaannya, kelitbangan dapat berperan dalam penyusunan naskah akademis dan penyediaan data bagi perangkat daerah, perumusan bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, serta penggerak inovasi daerah. Dalam implementasinya, tidak semua hasil kelitbangan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, mengingat terlaksananya kebijakan tidak selalu mulus dan ada faktor-faktor penghambat, seperti jadwal perencanaan, hambatan dari sisi penganggaran kegiatan, serta komitmen perangkat daerah pengusul kegiatan kelitbangan. Saat ini, salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya komitmen perangkat daerah pengusul terkait dengan tidak dijalankannya rekomendasi hasil kajian kelitbangan meskipun kegiatan kajian kelitbangan sudah sesuai dengan program di masing-masing SKPD. Di sisi lain, kendala politis seperti kebijakan pimpinan juga dapat menghambat pelaksanaan rekomendasi dari kajian kelitbangan yang dilakukan. Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh *political will*.

Tantangan yang diperoleh dari hasil evaluasi kondisi eksisting lainnya adalah adanya inovasi maupun kajian dari Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas yang belum melalui proses kelitbangan. Dalam beberapa kegiatan, hal ini kemudian berdampak pada perbedaan standar kualitas kajian kelitbangan di Pemerintah Kabupaten Banyumas dan optimalisasi pemanfaatan inovasi daerah karena terkait dengan urgensi yang sebenarnya dapat dikaji melalui proses kelitbangan.

Sesuai dengan tugas dari masing-masing komponen kelembagaan kelitbangan, maka evaluasi pelaksanaan kelitbangan menjadi tugas dari Tim Pengendali Mutu (TPM). Evaluasi dilakukan dalam bentuk kegiatan penilaian dan pengendalian yang dilakukan oleh TPM sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tengah tahun dan akhir tahun.

Komponen-komponen yang dievaluasi oleh TPM setidaknya-tidaknya mencakup enam kelompok meliputi:

- a. tingkat penjabaran dari Rencana Induk ke dalam Rencana Kerja Tahunan,
- b. tingkat pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan,
- c. tingkat ketercapaian output dari Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Induk,

- d. tingkat keterlibatan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kelitbangan,
- e. tingkat penindaklanjutan (*follow-up*) dari hasil-hasil kelitbangan, dan
- f. tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kelitbangan.

Evaluasi tengah tahun diharapkan dapat memberikan peringatan dini akan kinerja pelaksanaan kelitbangan sehingga dapat segera diambil tindakan koreksi untuk memperbaikinya di sisa waktu pada tahun yang berkenaan. Evaluasi akhir tahun diharapkan dapat menghasilkan evaluasi menyeluruh atas kinerja pada tahun berkenaan sebagai bahan untuk disampaikan pada sidang tahunan untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya.

Guna mempermudah dan menajamkan pelaksanaan evaluasi, maka perlu ditetapkan indikator-indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) sebagai obyek pengukuran dari evaluasi tersebut. Indikator kinerja kunci dikembangkan untuk masing-masing komponen evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci Pelaksanaan Kelitbangan 2021-2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat penjabaran dari Rencana Induk ke dalam Rencana Kerja Tahunan					
1a	Persentase tema prioritas per tahun yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan	NA	NA	75	75	75
2	Tingkat pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan					
2a	Persentase Rencana Kerja Tahunan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan dalam RKPD	NA	NA	90	90	90
3	Tingkat ketercapaian output dari Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Induk					
3a	Persentase ketercapaian output dari tema prioritas pada Rencana Induk	NA	NA	100	100	100
3b	Persentase ketercapaian output dari kegiatan pada Rencana Kerja Tahunan	NA	NA	100	100	100
4	Tingkat keterlibatan dan kerjasama dengan para pemangku					

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
	kepentingan dalam pelaksanaan kelitbangan					
4a	Jumlah (per tahun) pihak yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam kegiatan kelitbangan pada tahapan perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian	NA	NA	3	4	5
4b	Jumlah (per tahun) judul penelitian yang didanai secara non APBD Kabupaten Banyumas	NA	NA	2	2	4
4c	Jumlah (per tahun) anggota masyarakat yang mendapatkan penghargaan sebagai inovator lokal	NA	NA	2	2	2
5	Tingkat penindaklanjutan (follow-up) dari hasil-hasil kelitbangan					
5a	Jumlah (kumulatif) UMKM yang menggunakan hasil-hasil kelitbangan	NA	NA	1	2	3
5b	Persentase kegiatan penelitian dan pengkajian yang dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya (pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian)	NA	NA	50	50	50
5c	Jumlah (per tahun) kegiatan dari hasil-hasil kelitbangan (jurnal, seminar)	NA	NA	2	2	2
6	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kelitbangan					
6a	Jumlah (per tahun) infrastruktur/fasilitas kelitbangan yang dibangun/disediakan	NA	NA	1	1	1
6b	Jumlah (kumulatif) tenaga fungsional peneliti	NA	NA	1	1	2
6c	Jumlah (kumulatif) aparatur sipil negara yang menjadi anggota dari asosiasi profesi	NA	NA	1	1	2
6d	Jumlah (kumulatif) aparatur sipil	NA	NA	1	1	2

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
	negara yang mendapatkan sertifikasi keahlian					

4.3. Pelaporan

Pelaporan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Banyumas, mengikuti pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap aktivitas kelitbangan. Pelaporan dimaksud merupakan aktivitas yang sangat penting dan strategis untuk memberikan nilai tambah institusi kelitbangan serta memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaporan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Berkala dalam konteks ini adalah 6 (enam) bulan (per semester), atau 1 (satu) tahun (tahunan) sesuai tahapan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan. Adapun pelaksanaan pelaporan secara berjenjang adalah dari satu unit kerja kelitbangan paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, yang selanjutnya kepada Pemerintah Pusat.

BAB V

PENUTUP

Rencana Induk Kabupaten Banyumas menjadikan inovasi daerah sebagai kunci guna meningkatkan daya saing. Untuk itu, berbagai terget kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sangat perlu didekatkan dengan inovasi daerah sebagai sarana mengakselerasinya. Seluruh aspek pembangunan dan penyelesaian permasalahan daerah didekatkan dengan cara dan ide baru yang lebih mengedepankan kolaborasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Rencana Induk Kelitbang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 merupakan penjabaran dari isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Banyumas pada periode 2019 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 yang sesuai dengan pokok dan fungsi litbang, yakni di bidang penelitian dan pengembangan.

Rencana Induk Kelitbang ini merupakan salah satu acuan dalam penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan diharapkan mampu mendorong peran *stakeholder* dalam bidang penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Banyumas khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Rencana Induk Kelitbang ini selanjutnya merupakan alat manajemen untuk pengendalian melalui monitoring di samping alat evaluasi kinerja Penelitian dan Pengembangan. Pada akhirnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah OPD, Rencana Induk Kelitbang diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati Banyumas tahun 2018-2023.

NO	JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	Askelbang	
3	Kabang Litbang	
4	Ka. Bappeda Litbang	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN